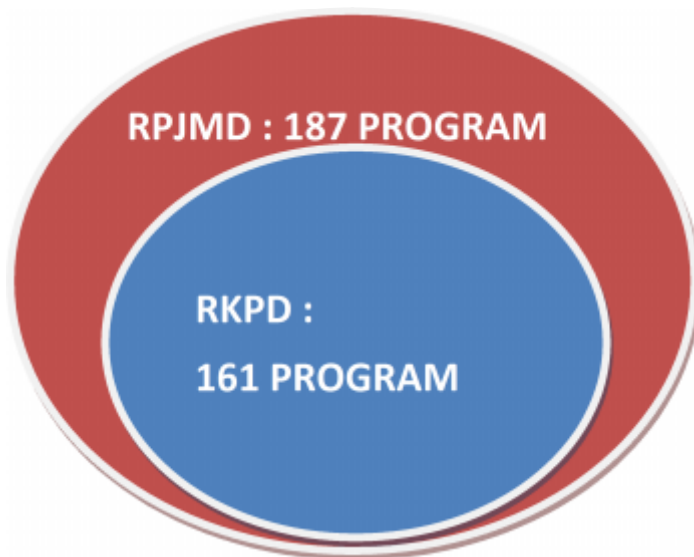


**EVALUASI KINERJA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015**

**A. RELEVANSI PROGRAM RPJMD DENGAN RKPD**

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 direncanakan terdapat 187 Program, dan dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2015 direncanakan sebanyak 161 program yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dimungkinkan karena selama 5 tahun pelaksanaan RPJMD, setiap tahun prioritas program yang direncanakan dalam dokumen RKPD berbeda-beda disesuaikan dengan arah dan kebijakan setiap tahunnya.



**Gambar 3.1. Jumlah Program RPJMD dan RKPD 2015**

Program-program yang terdapat dalam RPJMD dan tidak direncanakan dalam RKPD dapat dicermati dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1.  
Program RPJMD yang tidak direncanakan di RKPD**

No	Program	Terdapat dalam RPJMD	Terdapat dalam RKPD
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	x	
2.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	x	
3.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Databse Jalan dan Jembatan	x	
4.	Program Pendidikan Luar Biasa	x	
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan	x	

No	Program	Terdapat dalam RPJMD	Terdapat dalam RKPD
	Ekspor		
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	x	
7.	Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	x	
8.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	x	
9	Program pembinaan anak terlantar	x	
10.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	x	
11.	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	x	
12.	Program Penataan Struktur Industri	x	
13.	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	x	
14.	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	x	
15.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	x	
16.	Program Pengendalian kebakaran hutan	x	
17.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	x	
18.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	x	
19.	Program Peningkatan Pelayanan	x	
20.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	x	
21.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	x	
22.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	x	
23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	x	
24.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	x	

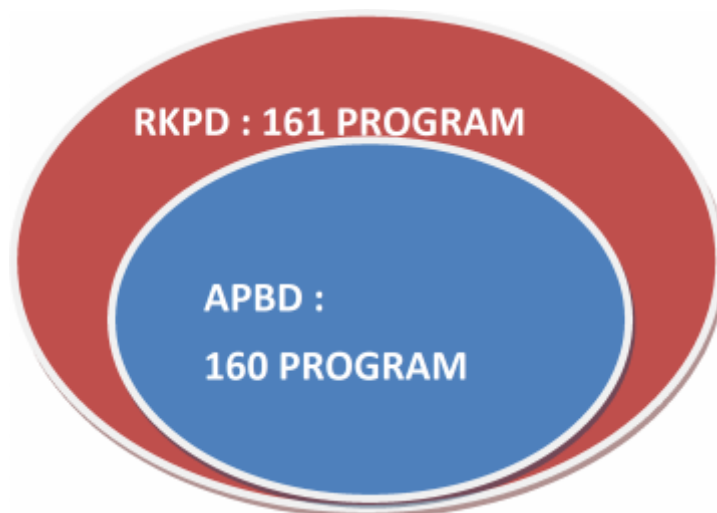
No	Program	Terdapat dalam RPJMD	Terdapat dalam RKPD
25.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	x	
26.	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	x	

Sumber: Bappeda Kab. Tegal, 2015.

Program-program yang terdapat dalam RPJMD dan tidak dianggarkan dalam RKPD merupakan program-program yang belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Selain itu program-program yang tidak terdapat dalam RKPD dimungkinkan secara substansi telah terwadahi oleh program-program yang telah ada di dalam RKPD.

## B. RELEVANSI PROGRAM RKPD DENGAN APBD

Dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2015 direncanakan sebanyak 161 program namun hanya terdapat 160 program yang direncanakan dalam APBD. Dari 160 program dalam APBD tersebut, 10 diantaranya tidak direncanakan dalam RKPD.



**Gambar 3.2. Jumlah Program RKPD 2014 dan APBD 2014**

Program-program yang terdapat dalam RKPD dan tidak direncanakan dalam APBD dapat dicermati dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2.  
Program RKPD yang tidak direncanakan di APBD**

No	Program	Terdapat dalam RKP	Terdapat dalam APBD
1.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	x	
2.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	x	
3.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	x	
4.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas	x	
5.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	x	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	x	
7.	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	x	
8.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	x	
9.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	x	
10.	Program Pemanfaatan Ruang	x	

Sumber: Bappeda Kab. Tegal, 2015.

Di samping itu, dari 160 program dalam APBD, 10 diantaranya tidak terdapat dalam RKP. Dari 10 program APBD yang tidak terdapat dalam RKP, 4 Program diantaranya juga tidak terdapat dalam RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati tabel berikut.

**Tabel 3.3.**  
**Program APBD yang Tidak Terdapat dalam RKP dan RPJMD**

No	Program	Tidak Terdapat dalam RKP	Tidak Terdapat dalam RPJMD
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	x	x
2.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan	x	x
3.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	x	x
4.	Program peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an	x	x
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	x	
6.	Program perencanaan dan pengembangan hutan	x	
7.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan	x	

No	Program	Tidak Terdapat dalam RKPD	Tidak Terdapat dalam RPJMD
	KB/KR yang mandiri		
8.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	x	
9.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	x	
10.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	x	

Sumber: Bappeda Kab. Tegal, 2015.

Program-program yang terdapat dalam RKPD dan tidak dianggarkan dalam APBD merupakan program-program yang belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Selain itu program-program yang tidak terdapat dalam APBD dimungkinkan secara substansi telah terwadahi oleh program-program yang telah ada di dalam APBD. Sementara program yang terdapat dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD dan RPJMD dimungkinkan karena program-program tersebut dibentuk dengan nomenklatur baru, padahal sesungguhnya dapat diwadahi dalam nomenklatur program yang ada dalam RPJMD dan RKPD.

### C. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2015

#### 1) URUSAN WAJIB

##### URUSAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diintervensi melalui 7 program untuk mencapai 56 indikator kinerja. Urusan Pendidikan kesemuanya dilaksanakan oleh Disdikpora. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pendidikan pada tahun 2015.

**Tabel 3.4.**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>				
	1. APK PAUD/TK (4-6 th)	80	65	31,61	Disdikpora
	2. APK PAUD/KB (0-4 th)	75	55	26,86	Disdikpora
	3. APM PAUD TK	66,02	58,02	56,94	Disdikpora
	4. Persentase PAUD terakreditasi	30	9	33,15	Disdikpora
2.	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>				
	1. APK SD/SDLB/MI/Paket A	113	110	105,90	Disdikpora
	2. APM SD/SDLB/MI/Paket A	99,00	97,93	92,36	Disdikpora
	3. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,00	95,28	99,28	Disdikpora

	4	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	93,49	89,84	77,16	Disdikpora
	5	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,13	0,20	0,22	Disdikpora
	6	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,50	0,60	0,61	Disdikpora
	7	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	99,99	99,99	99,99	Disdikpora
	8	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,99	99,99	99,78	Disdikpora
	9	Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB/Paket A	22,71	20,91	63,24	Disdikpora
	10	Nilai rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs/Paket B	23,74	22,54	49,20	Disdikpora
	11	Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM	93,54	89,89	51	Disdikpora
	12	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM	85,13	81,81	60	Disdikpora
	13	Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SPM	33,82	32	14,06	Disdikpora
	14	Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SPM	50	46	69	Disdikpora
	15	Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak	56	35,4	45	Disdikpora
	16	Tersedianya Lab IPA SMP/MTs	27 ruang	4 ruang	88	Disdikpora
	17	Tersedianya Peralatan Lab IPA SMP/MTs	24 Paket	2 paket	80	Disdikpora
	18	Persentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	56	35,4	42	Disdikpora
	19	Persentase SD/MI melaksanakan Kurikulum 2013	45	20	1,15	Disdikpora
	20	Persentase SMP/MTs melaksanakan Kurikulum 2013	21,2	9,2	6	Disdikpora
<b>3.</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>					
	1.	APK SMA/SMALB/MA/Paket C	64,85	60,85	70,77	Disdikpora
	2.	APM SMA/SMALB/MA/Paket C	62,04	54,04	63,75	Disdikpora
	3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/Paket C	0,40	0,48	0,50	Disdikpora
	4.	Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/Paket C	99,99	99,99	99,98	Disdikpora
	5.	Nilai rata-rata UN SMA/SMALB/MA/Paket C	39,49	37,29	48,66	Disdikpora
	6.	Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/MA sesuai SPM	88,28	84,84	90,12	Disdikpora
	7.	Persentase Perpustakaan SMA/SMALB/MA sesuai SPM	32,5	30,5	25	Disdikpora
	8.	Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C memiliki sanitasi layak	22,5	12,5	13,00	Disdikpora
	9.	Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C melaksanakan Kurikulum 2013	30	10	16	Disdikpora
<b>4.</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>					
	1.	Angka Kelulusan Paket A	99,99	96	96,52	Disdikpora
	2.	Angka Kelulusan Paket B	99,99	98	98,47	Disdikpora
	3.	Angka Kelulusan Paket C	99,99	99,99	99,62	Disdikpora
	4.	Persentase LKP kinerja A dan B	10	2	0	Disdikpora
	5.	Persentase Buta Aksara > 15 tahun	2,50	4,50	4,50	Disdikpora
	6.	Persentase Kecamatan memiliki PKBM	100	100	100	Disdikpora
<b>5.</b>	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>					

	1.	Angka kelulusan SDLB	99,99	99,99	100	Disdikpora
	2.	Angka kelulusan SMPLB	99,99	99,99	100	Disdikpora
	3.	Angka kelulusan SMALB	99,99	99,99	100	Disdikpora
6.	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>					
	1.	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV	35	34	36	Disdikpora
	2.	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV	85,00	78,50	81,87	Disdikpora
	3.	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkualifikasi S1/DIV	100	99	96	Disdikpora
	4.	Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA/Paket C berkualifikasi S1/DIV	100	100	97	Disdikpora
	5.	Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	26	16	26,87	Disdikpora
	6.	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	84,5	82,5	90,24	Disdikpora
	7.	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik	81,5	79,5	89,62	Disdikpora
	8.	Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA bersertifikat pendidik	89,7	85,7	86,87	Disdikpora
7.	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>					
	1.	Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	12	4	49	Disdikpora
	2.	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	25,5	8,6	7	Disdikpora
	3.	Persentase SMA/SMALB/MA yang terakreditasi	13,8	4,6	84	Disdikpora
	4.	Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik	79,5	75,5	80	Disdikpora
	5.	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik	76	72	75	Disdikpora
	6.	Persentase SMA/SMALB/MA yang melaksanakan MBS dengan baik	70,5	66,5	70	Disdikpora

Sumber: Disdikpora, 2015.

Capaian kinerja program PAUD rata-rata masih di bawah target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target kinerja Program PAUD yang ada, Indikator PAUD yang terakreditasi telah mencapai target kinerja di tahun 2015, yaitu 33,15% dari target 9%. Sementara indikator-indikator lain masih berada di bawah target kinerja. Hal ini disebabkan oleh data dasar tentang penduduk usia yang tidak relevan dengan tahun berjalan; motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak di usia 0-4 Tahun masih kurang; sarana dan prasarana PAUD yang kurang memadai. Untuk mengurai hal tersebut dibutuhkan data dasar penduduk usia yang valid setiap tahunnya; pengadaan sarana dan prasarana PAUD serta dukungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung langkah Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk APK SD/SDLB/MI/Paket A belum mencapai target kinerja di tahun 2015 masing-masing sebesar 105,90% dari target 110%. Namun untuk APK SD/SDLB/MI/Paket A telah mencapai target kinerja yang diharapkan, yaitu 99,28% dari target 95,28%. Angka Putus sekolah masih kurang diharapkan dari target capaian yaitu 0,22% dari target 0,20%. Namun rata-rata nilai ujian nasional ada di atas target capaian, yaitu 63,24 dari target 20,91 untuk SD/SDLB/MI/Paket A dan 49,20 dari target 22,54 untuk SMP/SMPLB/MTs/Paket B.

Kondisi ini disebabkan oleh sarana dan prasarana sekolah terutama gedung sekolah sangat mempengaruhi layanan pendidikan. Sekolah-sekolah juga perlu mendapat prioritas untuk direhabilitasi sebanyak 745 ruang atau sekitar 22,62% dari sekolah yang ada. Jumlah guru di Kabupaten Tegal juga masih mengalami kekurangan serta masih banyak SMP yang belum memiliki laboratorium komputer dan laboratorium bahasa dan belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran. Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan SMP juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas pungutan namun berkualitas.

APK dan APM Program Pendidikan Menengah telah di atas target capaian, namun capaian kinerja Angka Putus Sekolah masih belum tercapai dari target, yaitu 0,50% dari target 0,48%. Sementara nilai rata-rata UN telah mencapai target yang diharapkan, yaitu 48,66% dari target 37,29%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Menengah adalah belum meratanya jumlah SMA/SMK di setiap kecamatan di Kabupaten Tegal; perbandingan jumlah siswa SMA:SMK yang belum berimbang sehingga belum memenuhi sebagai Kabupaten Vokasi; rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan menengah berdampak pada angka putus sekolah; belum optimalnya pengembangan *link and match* antara sekolah dengan dunia usaha dan industri; jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang masih kurang; kurangnya jumlah sarana dan prasarana dan alat praktek masih belum memenuhi standar minimal pendidikan menengah.

Angka kelulusan Program Pendidikan Non Formal dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2015, yaitu 96,52% dari target 96%. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal diantaranya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan Non Formal masih kurang; belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal. Untuk meningkatkan kinerja Program Pendidikan Non Formal perlu dikembangkan keberadaan Pendidikan Non Formal pada setiap PKBM di Kecamatan serta penyediaan layanan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal.

Program Pendidikan Luar Biasa dengan tingkat kelulusan 100 % di atas dari target yang ditetapkan secara relatif tidak ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Sementara



untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, capaian kinerja Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1 telah di atas target, yaitu 36% dari target 34%. Pendidik SD Berkualifikasi S1 juga telah di atas target capaian yaitu 81,87% dari target 78,50%. Namun pendidik SMP dan SMA yang berkualifikasi S1 masih berada di bawah target capaian yaitu masing-masing 96% dari target 99% dan 100% dari target kinerja 97%. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah guru yang masih sangat kurang; profesionalisme guru yang masih rendah serta tingkat pendidikan guru yang belum S1.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal; belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan TIK untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel; belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal; belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan; ketimpangan kualifikasi sumberdaya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, capaian kinerja program ini cukup menggembirakan. Persentase SD yang terakreditasi telah memenuhi target, yaitu 49% dari target hanya 4%. Sejumlah usaha masih perlu dilakukan, diantaranya pembuatan SOP dalam setiap kegiatan; optimalisasi akses teknologi data pendidikan; peningkatan tata kelola dunia pendidikan yang lebih baik; dan optimalisasi pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

## URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan diampu oleh Dinkes, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Dinkop, UKM dan Pasar. Urusan Kesehatan terdiri dari 18 program dan 77 indikator. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2015.

**Tabel 3.5**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>				
	1. Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	100,00	62,07	65	Dinkes
	2. Persentase ketersediaan Obat	100,00	100,00	80	Dinkes

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	dan Perbekalan Kesehatan				
2.	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				
1.	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	98,00	95,00	74,25*****	Dinkes
2.	Persentase Puskesmas PONED sesuai SPM	100	27,59	37,9*****	Dinkes
3.	Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000)	1:48,79	1:48,79	1:54,47*****	Dinkes
4.	Persentase PPK BLUD Puskesmas	100	100	100	Dinkes
5.	Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	72,0	68,0	62,3	Dinkes
6.	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	96,90	88,90	62,99	Dinkes
7.	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	90,0	87,0	75	Dinkes
8.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80,0	70,0	84,63	Dinkes
9.	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	48,8	34,8	44,9	Dinkes
10	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	7,7	3,5	7,6	Dinkes
11	Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	45	25	25	Dinkes
12	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	66,0	55	Dinkes
13	Jumlah Puskesmas terakreditasi	29	8	6	Dinkes
14	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	27,59	20,69	Dinkes
15	Jumlah paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	29	29	29	Dinkes
16	Cakupan pelayanan perijinan	100	100	89,97	Dinkes
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	N/A	Dinkes
18	Cakupan pelayanan kesehatan khusus	100	100	74,24	Dinkes
19	Cakupan Call Center dan Jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	30	0	Dinkes
20	Persentase Tenaga Kesehatan terlatih PPGD, BCLS dan ATLS	100	30	N/A	Dinkes
3.	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1.	Jumlah inspeksi obat dan	2	2	8	Dinkes

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	makanan				
4.	<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>				
1.	Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan tradisional di Puskesmas	1	1	1	Dinkes
2.	Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku	3	1	0	Dinkes
3.	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari	50	20	13	Dinkes
5.	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>				
1.	Jumlah promosi WKJ	1	1	1	Dinkes
2.	Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll)	10	2	2	Dinkes
3.	Desa Siaga Strata Mandiri	5	1	6 (2,87%)	Dinkes
4.	Cakupan penjangkaran Siswa SD/MI	100	100	96,08	Dinkes
5.	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	4 UKBM	3 UKBM	3 UKBM	Dinkes
6.	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>				
1.	Prevalensi Balita gizi buruk	0,20	0,75	0,071***	Dinkes
2.	Prevalensi Balita gizi baik	99,80	99,25	99,03 ***	Dinkes
3.	Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	60,0	40	34,82**	Dinkes
4.	Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	25,0	15	7,68**	Dinkes
5.	Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	100,0	90	70,03**	Dinkes
7.	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>				
1.	Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat	1	1	0	Dinkes
2.	Jumlah pengembangan lingkungan sehat	8	4	0	Dinkes
8.	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>				
1.	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	100	96	82,89***	Dinkes
2.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	96	60***	Dinkes
3.	Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15th	2	2	0.66 (2 kasus)	Dinkes
4.	Angka Penemuan kasus baru TB	110	95	Belum ada laporan	Dinkes
5.	Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	90	90	Belum ada laporan	Dinkes
6.	Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	130	93	95****	Dinkes
7.	Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	80	65	73*****	Dinkes

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
8.	Angka Penemuan kasus baru Kusta	1,6	1,52	1,3****	Dinkes
9.	Angka kesakitan DBD	8	15	26****	Dinkes
10	Angka kematian DBD	1	3.5	2,9****	Dinkes
11	Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani	75	60	40****	Dinkes
12	Cakupan penderita Diare yang ditangani	100	100	89****	Dinkes
13	Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100 (1kasus)	Dinkes
9.	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>				
1.	Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun	1	1	1	Dinkes
2.	Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan	1	1	1	Dinkes
10.	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>				
1.	Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN	66.000	66.000	66.000	Dinkes
11.	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b>				
1.	Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap	29	13	9	Dinkes
2.	Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap	100,00	44,83	100	Dinkes
3.	Jumlah paket pelatihan Pokjandal Posyandu	1	1	1	Dinkes
4.	Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer	1	2	1	Dinkes
5.	Jumlah ambulance di Fasyankes Primer	58	25	15	Dinkes
12.	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>				
1.	Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD	85.000	60.000	118.575	RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi
2.	Jumlah pelayanan rawat inap RSUD	35.000	26.000	29.513	RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi
13.	<b>Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>				

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	Jumlah Faskes Primer yang melayani JKN	29	29	29	Dinkes
14.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>				
1.	Angka Kematian Bayi	7,60	8,60	9,4***	Dinkes
2.	Angka Kematian Balita	8,3	9,4	10,4***	Dinkes
3.	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	97	85	63,6***	Dinkes
4.	Cakupan kunjungan bayi	99	95	82,1***	Dinkes
5.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	89	85	80,8***	Dinkes
15.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>				
1.	Jumlah Lansia	3.752	3.515	43.763**	Dinkes
2.	Cakupan Lansia terlayani kesehatan	12,2	8,2	6,21**	Dinkes
16.	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>				
1.	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	66,0	55	Dinkes
2.	Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM	65 UKM	30 UKM	30 UKM	Dinkop UKM Pasar
17.	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>				
1.	Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	100,00	90,00	78,80**	Dinkes
2.	Angka Kematian Ibu	93,3	126,6	120 (24 kasus kematian)**	Dinkes
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	90	67,44**	Dinkes
4.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	97	90	92,21**	Dinkes
5.	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	97	94	70,77**	Dinkes
6.	Cakupan Ibu Hamil K4	94	90	69,16**	Dinkes
18.	<b>Program Peningkatan Pelayanan</b>				
1.	Klasifikasi RS dr Soeselo menjadi kelas B Pendidikan	100	25	25%	RSUD dr. Soeselo
2.	Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo	100	50	56%	RSUD dr. Soeselo

Sumber: Dinkes; RSUD dr. Soeselo; RSUD Suradadi; Dinkop UKM Pasar, 2015.

\* Triwulan II

\*\* Triwulan III

\*\*\* Oktober

\*\*\*\* November

\*\*\*\*\* Triwulan IV

Pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 2 indikator, yaitu Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar dan Persentase

ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang terealisasi masing-masing 65% dan 80% dari target 62,07% dan 100%. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai daftar obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum dalam e-Catalog LKPP, berdasarkan usulan puskesmas dan pengelola obat program dengan mempertimbangkan stok obat dan perbekalan kesehatan di Gudang Farmasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan indikator ini adalah rak obat, pengukur suhu ruangan, lemari narkotik/psikotropik belum tersedia; ada beberapa sarana yang rusak, diantaranya: alarm, genset dan AC; pemanfaatan sarana komputer untuk pelayanan e-logistic belum dilaksanakan; penayangan daftar obat dan perbekalan kesehatan di e-catalog LKPP masih bertahap dan tidak awal tahun 2015; ada beberapa *item* obat dan perbekalan kesehatan yang tidak tersedia di e-catalog LKPP; ada beberapa *item* obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum di e-catalog LKPP, tetapi tidak dilayani/ditolak penyedia (pihak pabrikan); anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Dana DAK) tahun 2015 mengalami penurunan, sehingga kekurangan anggaran disediakan oleh puskesmas melalui Anggaran Kapitasi JKN Puskesmas; belum siapnya SDM puskesmas dalam melakukan proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; ada obat yang kadaluarsa di Gudang Farmasi akibat menurunnya kasus penyakit di puskesmas, sehingga pemakaian obat lebih rendah dari ketersediaan obat yang direncanakan.

Untuk itu rekomendasi yang dapat dilakukan adalah pengadaan dan perbaikan sarana yang belum tersedia dan yang rusak; pemanfaatan sarana komputer untuk pelayanan e-logistic; mengajukan usulan kepada LKPP dan Kemenkes agar penayangan daftar obat dan perbekalan kesehatan di e-catalog LKPP di awal tahun, serta untuk obat dan perbekalan kesehatan yang bersifat *fast moving* pihak penyedia/pabrikan lebih dari satu; obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum di e-catalog LKPP tetapi tidak dilayani/ditolak penyedia (pihak pabrikan) pengadaannya dilakukan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan petunjuk teknisnya; anggaran untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan disentralkan satu pintu; dibentuknya Tim Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Secara Terpadu di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang lebih baik.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari indikator antara lain Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap dan Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap dan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan masing-masing 96% dan terealisasi masing-masing 82,89% dan 60% pada bulan Oktober 2015. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini adalah ada sebagian

masyarakat yang menolak imunisasi karena pemahaman vaksin haram; mobilitas penduduk di beberapa wilayah cukup tinggi; angka kelahiran yang turun berpengaruh pada target sasaran bayi karena penentuan target berdasarkan angka kelahiran riil; umpan balik Laporan imunisasi dari Swasta ke Puskesmas belum rutin dilaksanakan. Untuk itu rekomendasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang fatwa halal vaksin dari MUI untuk mengubah paradigma imunisasi di masyarakat; melakukan pendataan sasaran secara riil dan melakukan validasi dan akurasi data cakupan imunisasi rutin setiap bulan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita terdiri dari antara lain indikator Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 9,4 dan 10,4 pada bulan Oktober 2015 dari target masing-masing sebanyak 8,60 dan 9,4. Permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan Angka Kematian bayi dan Balita adalah tatalaksana neonatus di puskesmas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya; RS rujukan masih belum memiliki alkes pelayanan neonatus yang memadai; masih ada nakes belum mengetahui kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan); penyebab kematian bayi masih dominan karena BBLR (berat bayi lahir rendah) berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil; penyebab tidak langsung adalah pendidikan ibu yang masih rendah

Rekomendasi yang perlu diperhatikan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita adalah peningkatan dan penguatan tatalaksana neonatus di puskesmas; peningkatan kualitas SDM; pengadaan alkes pelayanan kesehatan neonatus baik di RS/Puskesmas; peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan pemberian informasi kesehatan pada ibu hamil/remaja

Indikator kinerja program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata telah tercapai, yaitu 118.575 jumlah pelayanan rawat jalan RSUD, lebih banyak dari target sebanyak 60.000 kunjungan. Begitu juga untuk pelayanan rawat inap, dari target 26.000 terealisasi sebanyak 29.513 rawat inap. Menetapkan dan menginterpretasikan indikator ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Target kinerja yang ditetapkan meningkat bukan dimaknai untuk memperbanyak orang sakit melainkan menunjukkan gambaran kinerja orang sakit yang dilayani. Meningkatnya jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan di RSUD menggambarkan bahwa pasien rawat inap dan rawat jalan telah ditangani.

Program Peningkatan Pelayanan diamanatkan Klasifikasi RS dr. Soeselo menjadi kelas B Pendidikan. Untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat 4 instrumen kegiatan, yaitu: pengumpulan informasi persiapan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan (100%), pemenuhan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan, bimbingan dan penyempurnaan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan dan visitasi penilaian RS

kelas B pendidikan. Sementara indikator Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo terdiri dari 8 layanan, yaitu: klinik perjanjian (100%); klinik akupunktur dan jamu terpadu (100%); IBS&ICU/ICCU/PICU/NICU (50%); laboratorium patologi anatomi (100%); pelayanan kardiologi terpadu (25%); pelayanan geriatri terpadu; pusat rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal terpadu (80%) dan Forum Sahabat RSUD dr. Soeselo sehingga rata-rata capaian kinerjanya adalah 56%, di atas target kinerja sebesar 50%.

## URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 13 program dan 22 indikator. Urusan Pekerjaan Umum diampu oleh DPU. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015.

**Tabel 3.6**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Pekerjaan Umum**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>				
	1. Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga	68	63	49,95	DPU
	2. Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar Bina Marga	70	66	63,58	DPU
	3. Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m	147,7 km	139,7 km (jalingkos)	34,04	DPU
	4. Jumlah panjang jalan lebar 9 m	71,5 km	71,5 km	12,39	DPU
	5. Jumlah panjang jalan kolektor	194 km	194 km	186	DPU
2.	<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>				
	1. Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik	45	41	38	DPU
	2. Persentase drainase jalan desa berfungsi baik	50	46	0	DPU
3.	<b>Program Pembangunan turap/talud/bronjong</b>				
	1. Panjang talud jalan kabupaten terbangun	20.500 m'	6.500 m'	5.400	DPU
	2. Panjang talud jalan desa terbangun	17.000 m'	9.000 m'	0	DPU
	3. Panjang talud pengairan yang terbangun	650 m'	200 m'	215	DPU
	4. Panjang talud pengairan yang direhabilitasi	630 m'	120 m'	105	DPU
4.	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>				
	1. Panjang jalan	220 km'	160 km'	78,92	DPU



No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	direhabilitasi				
2.	Jumlah jembatan direhabilitasi	210 bh	70 bh	8	DPU
5.	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong</b>				
1.	Persentase panjang talud direhabilitasi	15	11	5	DPU
6.	<b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan</b>				
1.	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif	1	0	0	DPU
7.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>				
1.	jumlah inspeksi jalan dan jembatan	300 ruas	100 ruas	95 ruas	DPU
8.	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>				
1.	panjang irigasi dalam kondisi baik	7.500 m'	2.500 m'	2.000 m'	DPU
9.	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>				
1.	Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik	40	20	15	DPU
10.	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>				
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan	38,48	30,48	46,4	DPU
11.	<b>Program pengendalian banjir</b>				
1.	Persentase kawasan rawan banjir	4,50	4,90	4,90	DPU
12.	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>				
1.	jumlah pengembangan kota satelit	1	1	0	DPU
13.	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaaan</b>				
1.	Cakupan infrastruktur perdesaaan kondisi baik	68	57	45	DPU

Sumber: DPU, 2015.

Capaian indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten sesuai standar Bina Marga pada Program pembangunan jalan dan jembatan masih belum memenuhi target. Ditargetkan 63 Km, pada tahun 2015 realisasi kinerja baru 49,95 Km. Begitu juga jumlah panjang jalan kolektor, baru terealisasi 186 Km dari target 194 Km pada tahun 2015. Sementara pada Program pembangunan

turap/talud/bronjong, panjang talud jalan kabupaten terbangun baru sepanjang 5.400 m, dari target 6.500 m. Indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum masih memuat indikator-indikator yang menjadi kewenangan desa (jalan, talud) maupun provinsi (sungai, danau). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya cenderung minimal.

Pada Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, realisasi pada tahun 2015 juga masih di bawah target. Dari target 160 Km jalan direhabilitasi baru terealisasi 78,92 Km. Namun pada Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah, pada indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan, target kinerja sebesar 30,48% telah tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 46,4%. Angka ini bahkan jauh di atas target di akhir periode rPJMD 2014-2019, yang menetapkan target kinerja 38,48%. Masih rendahnya beberapa capaian kinerja indikator Urusan Pekerjaan Umum membutuhkan dukungan semua pihak, baik personalia DPU maupun *stakeholders* terkait untuk dapat melakukan percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas.

## URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 5 program dan 11 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat yang diampu oleh Bapermasdes, DPU dan Dinsosnakertrans pada tahun 2015.

**Tabel 3.7**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Perumahan Rakyat**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				
	1. Persentase rumah layak huni	91,35	90,8	N/A	Bapermasdes
	2. Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	600	600	N/A	Bapermasdes
2.	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>				
	1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	82,25	74,25	78,4	DPU
	2. Jumlah paket pelatihan BP-SPAM	1	1	N/A	Bapermasdes
3.	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>				
	1. Jumlah kegiatan pemukiman berbasis masyarakat	15	7	1	DPU
	2. jumlah kelompok pelestarian lingkungan perumahan	15	7	1	DPU
4.	<b>Program peningkatan kesiagaan</b>				

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	<b>dan pencegahan bahaya kebakaran</b>				
1.	Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk	0,000030	0,000020	0,000022	DPU
2.	Jumlah mobil damkar	7 unit	6 unit	5	DPU
3.	Persentase kasus kebakaran ditangani	100	70	70	DPU
4.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	42,76	42,69	N/A	DPU
5.	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>				
1.	Jumlah areal pemakaman	282	282	1	Dinsosnakertrans

Sumber: Bapermasdes; DPU; Dinsosnakertrans, 2015.

Capaian kinerja Program lingkungan sehat perumahan, yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih telah tercapai di atas target. RPJMD menargetkan pada tahun 2015 sebesar 74,25% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, terealisasi sebesar 78,40%. Rasio jumlah petugas damkar dibanding jumlah penduduk terealisasi sebesar 0,000022, lebih tinggi dibanding target sebesar 0,00020. Sementara jumlah mobil pemadam kebakaran dari target 6 unit pada tahun 2015 terealisasi 5 unit.

Capaian kinerja Jumlah Areal Pemakaman Tahun 2015 belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 disebabkan karena jumlah areal pemakaman yang dikelola oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal sesuai dengan jumlah anggaran dan kegiatan hanya 1 areal pemakaman yaitu Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan adalah salah satu tupoksi Dinsosnakertrans yang harus dilaksanakan dalam pelestarian nilai-nilai perintis kemerdekaan dan kepahlawanan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah program pengelolaan areal pemakaman dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (penyempurnaan pagar taman, pengurugan dan penerangan area TMP sebesar Rp. 100.000.000,-) dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (Honorarium PHL 2 orang sebesar Rp. 18.150.000,- )

## URUSAN PENATAAN RUANG

Urusan Penataan Ruang terdiri dari 2 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Penataan Ruang diampu oleh Bappeda. Berikut adalah indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penataan Ruang pada tahun 2015.

**Tabel 3.8**

**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015  
Urusan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>				
1.	Jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang	18	5	5	Bappeda
2.	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>				
1.	Jumlah penindakan pelanggaran tata ruang	10	1	0	Bappeda

Sumber: Bappeda, 2015.

Pada Program Perencanaan Tata Ruang, indikator jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang telah terealisasi dalam bentuk kajian konsultan yang dapat ditingkatkan menjadi Perda. Hingga tahun 2015 telah dilaksanakan studi dan Rancangan RDTR. Pada tahun 2016 akan dilaksanakan Review RTRW terlebih dahulu sehingga penyusunan dan penetapan Perda dilakukan setelah Review RTRW. Untuk indikator jumlah penindakan pelanggaran tata ruang juga 0, karena tidak adanya data pelanggaran tata ruang. Pihak yang berwenang melakukan penindakan adalah PPNS dan Satpol PP sehingga diperlukan koordinasi dengan PPNS terkait penindakan pelanggaran Tata Ruang.

**URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 9 program dan 9 indikator kinerja. Urusan Perencanaan Pembangunan diampu oleh Bappeda dan BPBD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2015.

**Tabel 3.9  
Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015  
Urusan Perencanaan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>				
1.	Jumlah sistem informasi daerah aktif	3	3	2	Bappeda
2.	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>				
1.	Jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan	5	5	7	Bappeda
3.	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>				
1.	Jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti	4	3	0	Bappeda
4.	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota</b>				

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	<b>menengah dan besar</b>				
1.	Cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan	18	10	16	Bappeda
5.	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>				
1.	Jumlah aparatur perencana kabupaten yang memiliki kompetensi perencana	15	11	10	Bappeda
6.	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				
1.	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	11	2	2	Bappeda
7.	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>				
1.	Jumlah klaster yang difasilitasi	30	10	6	Bappeda
8.	<b>Program perencanaan sosial budaya</b>				
1.	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	5	5	4	Bappeda
9.	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>				
1.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	2	2	2	BPBD

Sumber: Bappeda, BPBD, 2015.

Indikator jumlah sistem informasi daerah aktif teralisasi 2 sistem informasi daerah aktif dari target kinerja 3 sistem informasi daerah aktif. sistem informasi daerah aktif meliputi SIPD dan SIPP. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan sistem informasi daerah aktif adalah kurangnya SDM, komunikasi dan ketidaksepahaman dalam berjejaring dengan SKPD terkait.

Untuk indikator jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan tercapai 7 kerjasama dari target 5 kerjasama. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama pembangunan dengan IPB, BPPT, Kemendikbud, UPS, UGM, Unsoed dan Universitas Guna Dharma. Pada indikator jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti belum ada. Hal ini karena kebijakan yang ada saat ini masih bersifat makro (dalam lingkup Kabupaten) dan belum ada kebijakan satu sektor (lingkup kecamatan). Sedangkan indikator cakupan Pelayanan SPAM di Kota Kecamatan telah tercapai 16 Kecamatan dari target 10 kecamatan. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator ini adalah beberapa kecamatan memiliki kontur yang relatif susah untuk penyediaan SPAM dan belum disertai adanya saluran SPAM di setiap kecamatan.

Jumlah Aparatur Perencana Kabupaten yang memiliki kompetensi perencana adalah 10 orang, masih di bawah target 11 orang. Permasalahan yang dihadapi adalah minat yang

rendah terhadap jabatan fungsional termasuk fungsional perencana. Untuk itu rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu dengan arahan dan dorongan dari pimpinan kepada karyawan/wati agar mengikuti diklat fungsional dimaksud.

Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu ada 2, yaitu RKPD dan RKPD Perubahan. Untuk mewujudkan indikator ini realtif tidak ditemui hambatan. Indikator jumlah klaster yang difasilitasi adalah 6 klaster, masih di bawah target 10 klaster. Pelaksanaan indikator ini melalui program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (FEDEP). Permasalahan yang dihadapi adalah keseriusan semua pihak dalam upaya mempertahankan klaster dan meningkatkan status sentra menjadi klaster.

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan sebanyak 4 dokumen terdiri dari RAD MDG's, RAD PUS, SPKD dan RAD PPK (RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi). Jumlah ini masih di bawah target sebanyak 5 dokumen. Indikator ini dicapai melalui kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Sementara untuk indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana telah tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen. Dokumen tersebut adalah pemetaan wilayah rawan bencana dan kajian pemetaan pasca bencana banjir dan longsor. Secara umum tidak ditemui kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.

## URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan diampu oleh Dishubkominfo dan terdiri dari 4 program dengan 3 indikator. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perhubungan pada tahun 2015.

**Tabel 3.10**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Perhubungan**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>				
	1. Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	74	100	Dishubkominfo
2.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>				
	1. Persentase sarana perhubungan	78	74	100	Dishubkominfo

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	berfungsi baik				
3.	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>				
1.	Persentase AKDP berijin	100	80	100	Dishubkominfo
2.	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	67,00	55,00	100	Dishubkominfo
4.	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.</b>				
1.	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	74	100	Dishubkominfo

Sumber: Dishubkominfo, 2015.

Dari laporan yang disampaikan Dishubkominfo, target kinerja pada semua indikator telah tercapai sebesar 100%. Indikator persentase sarana perhubungan berfungsi baik dari target kinerja sebesar 74% terealisasi 100%. Dengan demikian menurut Dishubkominfo sudah tidak ada lagi sarana perhubungan yang dalam kondisi rusak. Begitu juga persentase AKDP berizin dan persentase kendaraan umum yang diuji KIR, dari target kinerja masing-masing 80% dan 55% telah terealisasi masing-masing sebesar 100%. Menurut data Dishubkominfo semua AKDP yang ada telah memiliki izin dan semua kendaraan umum yang ada telah diuji KIR. Dengan demikian dapat dipastikan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan target kinerja Urusan Perhubungan di Dishubkominfo.

#### URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan hidup terdiri dari 8 program dan 14 indikator kinerja. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh DPU, BLH dan Distanbunhut. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2015.

**Tabel 3.11**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Lingkungan Hidup**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				
1.	Persentase TPA sesuai standar	34,64	9,32	41,70	DPU
2.	Persentase TPS sesuai standar	82,81	75	35	DPU
3.	Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0,01459	0,01419	0,41380	DPU
4.	Persentase sampah yang terangkut	75,25	67,25	41,38	DPU
5.	Jumlah Bank Sampah	56 bank	36 bank	81 bank	DPU/BLH
2.	<b>Program Pengendalian</b>				

	<b>Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>					
	1.	Persentase UKL-UPL yang dipantau	70	50	13,4	BLH
3.	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>					
	1.	Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	30 Perusahaan	30 Perusahaan	30 perusahaan	BLH
4.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam</b>					
	1.	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	8,6	8,2	7,58	Distanbunhut
5.	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>					
	1.	Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1 paket	1 paket	1 paket	BLH
	2.	Jumlah Sarana/media penyampaian informasi lingkungan hidup	1 paket	1 paket	1 paket	BLH
6.	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>					
	1.	Persentase kawasan tercemar polutan udara	0,75	0,95	1,0	BLH
	2.	Persentase kawasan tercemar polutan air	3,75	3,95	4,0	BLH
7.	<b>Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut</b>					
	1.	Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir	1 paket	1 paket		DKPP
8.	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>					
	1.	Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan	5,7	4,5	19,56	DPU
	2.	Jumlah RTP	1	1	1	DPU

Sumber: DPU; BLH; Distanbunhut; 2015

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan capaian kinerja TPA sesuai standar sudah mencapai target kinerja, yaitu 41,70% berbanding 9,32% untuk persentase TPA sesuai standar. Sementara untuk indikator TPS sesuai standar masih di bawah target (35% dibanding 82,81%). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan TPS dan sarana penunjang lainnya yang terbatas. Capaian kinerja indikator persentase sampah terangkut masih di bawah target, yaitu 41,38% dibanding target sebesar 67,25%. Hal ini antara lain di samping karena keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah bank sampah di masyarakat.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga terdapat indikator kinerja Jumlah Bank Sampah. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 untuk tahun 2019 sebanyak 56 Bank Sampah, sedangkan target tahun 2015



sebanyak 36 bank sampah. Sampai dengan akhir tahun 2015 telah terbentuk bank sampah di Kabupaten Tegal sebanyak 81 bank sampah dan telah ditetapkan keberadaannya dengan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan demikian target untuk tahun 2015 maupun tahun 2019 telah terpenuhi. Namun demikian, proses pembinaan bank sampah harus terus dilaksanakan baik untuk menambah jumlah bank sampah di Kabupaten Tegal maupun untuk memastikan bank sampah yang telah didirikan bisa beroperasi secara maksimal.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Persentase UKL-UPL yang dipantau, target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 50%, sedangkan realisasinya sebesar 13,4 %. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya perusahaan yang harus dipantau, sementara aparat yang ada jumlahnya sangat sedikit sehingga untuk periode 1 tahun tidak mampu untuk mencukupi target yang ditetapkan. Ke depan perlu peningkatan anggaran maupun personil sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, indikator kinerja Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH, telah dilaksanakan pengawasan sebanyak 30 perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 30 perusahaan. Sementara pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH, target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebanyak 1 paket. Target ini telah tercukupi dengan adanya penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai bagian dari sistem informasi sumber daya alam dan LH di Kabupaten Tegal. Indikator Kinerja Jumlah sarana/media penyampaian informasi lingkungan hidup untuk tahun 2015 telah terpenuhi melalui pameran lingkungan hidup, maupun sosialisasi.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi, untuk indikator kinerja Persentase kawasan tercemar polutan udara pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 0.95%. Target ini belum dapat terpenuhi karena kompleksitas permasalahan yang ada mengingat pencemaran ini akibat aktivitas usaha kecil yang telah digeluti masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Upaya yang telah dilakukan baru sebatas fasilitasi relokasi unit usaha yang menimbulkan pencemaran udara ke area yang menjauh dari permukiman warga, namun demikian ke depan perlu ditingkatkan fasilitasi alih teknologi yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pencemaran udara dapat diminimalisir.

Untuk indikator Persentase Kawasan tercemar polutan air tahun 2015 ditargetkan sebesar 3,95%, diperkirakan belum bisa terpenuhi. Hal ini disebabkan karena mayoritas terjadinya pencemaran air adalah akibat aktivitas industri kecil seperti industri tahu,

tempe, dan batik. Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tegal memfasilitasi melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) maupun pembangunan biodigester. Akan tetapi semenjak tahun 2015, fasilitas ini tidak dapat dilanjutkan akibat terganjal aturan hibah sehingga upaya penanganan pencemaran air khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas usaha kecil tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ke depan diharapkan ada upaya swadaya masyarakat untuk bisa mengatasi pencemaran di lingkungan masing-masing sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan di lingkungan sekitar.

Berdasarkan Data “Dokumen Penyusunan Strategi Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015” diketahui bahwa Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) maupun RTP (Ruang Terbuka Publik) Di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut, Luas Kawasan Perkotaan seluas 31.205,99 Ha; total persentase RTH Publik dibanding Luas wilayah perkotaan sebesar 6,17% dan total persentase potensi RTH Publik sebesar 19,56%. Mendasari data tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa capaian/realisasi tahun 2015 Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan adalah sebesar 6,17%. Jadi merujuk pada target RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019 sebesar 5,7% maka capaian persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan Kabupaten Tegal pada Tahun 2015 telah terpenuhi yaitu mencapai 6,17%. Hal ini juga berlaku bagi target capaian untuk persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 4,5% telah tercapai karena realisasi capaian total persentase RTH publik dibanding luas wilayah Perkotaan di Kabupaten Tegal tahun 2015 mencapai 6,17%.

Hal ini juga berlaku untuk RTP (Ruang Terbuka Publik), karena dari target RPJMD tahun 2019 maupun target tahun 2015 untuk jumlah RTP adalah 1. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk kawasan perkotaan Slawi sebagai ibukota Kabupaten telah memiliki setidaknya 1 RTP yaitu Trasa. Di samping itu masih terdapat AAS dan RTH depan Rumdin Bupati Tegal. Capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dicapai karena untuk masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten Tegal masih memiliki RTH yang umumnya difungsikan sebagai Ruang Terbuka Publik. Sebagian besar RTH di wilayah perkotaan Kabupaten Tegal berupa lapangan. RTH di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tegal telah ditata menjadi lebih representatif, diantaranya RTH Kecamatan Dukuhwaru dan Kecamatan Margasari. Program Penataan RTH dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator kerja namun tidak setiap tahun dilaksanakan. Namun untuk pemeliharaan rutin (Khusus dikota Slawi) diintervensi melalui Kegiatan Pemeliharaan RTH.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja adalah tidak diakomodasinya usulan kegiatan dalam

pembahasan dengan legislatif, terutama untuk pembangunan RTH pada kecamatan yang masih relatif tertinggal dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pagerbarang. Pembangunan atau penataan RTH di kedua kecamatan tersebut diarahkan agar memberikan *multiplier effect* bagi perkembangan perekonomian maupun pembangunan untuk dapat menumbuhkan ekonomi kreatif maupun sebagai wadah masyarakat dalam berinteraksi sosial maupun ekonomi.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat tercapai adalah sebagai berikut: perlu adanya dukungan data mengenai RTH maupun RTP yang valid dan *up to date* melalui Kegiatan Penyusunan Data Kondisi dan Strategi Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan di Kabupaten Tegal, sebagai dasar yang kuat maupun *blueprint* (cetak biru) bagi perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan RTH di Kabupaten Tegal yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan; dukungan anggaran yang cukup untuk penyediaan, penataan dan pemeliharaan RTH maupun RTP yang representatif untuk masyarakat Kabupaten Tegal; *capacity building* dan diseminasi peraturan maupun regulasi bagi personel dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan RTH maupun RTP di Kabupaten Tegal, khususnya di Seksi Pertamanan Bidang Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan DPU Kabupaten Tegal sebagai *leading* untuk RTH dan RTP di Kabupaten Tegal.

## URUSAN PERTANAHAN

Indikator kinerja pada Urusan Pertanahan sebanyak 2 buah, dengan 2 program dan diampu oleh Bagian Pemerintahan Setda. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanahan pada tahun 2015.

**Tabel 3.12**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Pertanahan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>				
	1. Jumlah sertifikasi tanah pemerintah	60	20	23	Setda
2.	<b>Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				
	2. Penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang)	60	20	24	Setda

Sumber: Setda, 2015.

Dari 2 indikator kinerja Urusan Pertanahan, yaitu jumlah sertifikasi tanah pemerintah dan penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang) telah memenuhi target yang

telah ditetapkan. Pada tahun 2015 ditetapkan target 20 sertifikat, dapat direalisasikan 23 sertifikat. Sementara bidang tanah yang disediakan sebanyak 24 bidang, di atas target yang ditetapkan yaitu 20 bidang. Secara umum kedua indikator ini tidak menemui kendala untuk diwujudkan.

## URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 1 program dengan 4 indikator dan diampul oleh Disdukcapil. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Tabel 3.13**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>				
1.	Persentase penduduk memiliki KTP	100	80	79,34*	Disdukcapil
2.	Persentase penduduk memiliki kartu keluarga	100	85	60,74*	Disdukcapil
3.	Persentase penduduk memiliki akta kematian	30	5	0*	Disdukcapil
4.	Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100	85	47,70*	Disdukcapil

Sumber: Disdukcapil, 2015.

\*Data per Triwulan II

Dari 4 indikator kinerja pada Program Penataan Administrasi Kependudukan semuanya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator persentase penduduk memiliki KTP teralisasi 79,34% dari target 80%. Begitu juga indikator persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga terealisasi 60,74% dari target 85%. Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebesar 47,70%, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 85%. Untuk indikator persentase penduduk memiliki akta kematian terealisasi 0 dari target 5%. Data SIAK triwulan III dan IV tahun 2015 baru dapat diakses dari Ditjen Adminduk Kemendagri pada bulan Januari 2015, untuk itu data yang dapat disajikan adalah data sampai dengan Triwulan II.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan administrasi kependudukan antara lain akata kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sebelum tahun 2012 masih menggunakan sistem manual. Baru pada tahun 2012 menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun telah menggunakan SIAK, untuk pencatatan akta kematian yang rendah karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian

keluarganya juga rendah. Masyarakat mendaftarkan kematian keluarganya hanya ketika akan memproses waris secara resmi di pengadilan. Apabila waris diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat umumnya tidak membuat akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal. Untuk itu, selain sosialisasi mengenai pentingnya data kependudukan, perlu juga diinisiasi kemudahan-kemudahan dan insentif agar masyarakat dapat termotivasi mencatatkan administrasi kependudukannya.

## URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 4 program dan 38 indikator kinerja. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh BPPKB dan Bapermasdes. Berikut disajikan tabel capaian, indikator dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 3.14**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2015**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>				
1.	Pencapaian Kota Layak Anak	Kab Tegal KLA	KLA Pratama	0	BPPKB
2.	Jumlah kebijakan perlindungan anak	2	2	1	BPPKB
3.	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	90	50	78	BPPKB
4.	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti	100	100	100	BPPKB
2.	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>				
1.	Jumlah SKPD melaksanakan PPRG	54	10	30	BPPKB
2.	Jumlah pengambil kebijakan di tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender	47	40	40	BPPKB
3.	Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah	50	50	50	BPPKB
4.	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50	50	50	BPPKB
5.	Jumlah Tim Kab dan UPT Kec yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50	50	50	BPPKB
6.	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	100	100	N/A	BPPKB
7.	Cakupan penegakan hukum	100	100	100	BPPKB

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				
8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	100	100	100	BPPKB
9.	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	75	55	55	BPPKB
10.	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75,0	55,0	55	BPPKB
11.	Cakupan masyarakat dan lembaga yang paham UU No. 23 Tahun 2002	25	25	25	BPPKB
12.	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	50	50	75	BPPKB
13.	Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	67	50	7,025	BPPKB
14.	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	25 PAUD	25 PAUD	66 PAUD	BPPKB
15.	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	4 Kec	3 kec	4 kec	BPPKB
16.	Jumlah Forum anak yang aktif	5 Forum	4 Forum	3 Forum	BPPKB
17.	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	100 (31 Indikator)	100 % (31 indikator)	0	BPPKB
18.	Jumlah desa binaan PKK	33	33	33	Bapermasdes
19.	Jumlah masyarakat mitra P2MBG	60	60	40	Bapermasdes
20.	Jumlah Pengajar PAUD yang terlatih	18	18	0	Bapermasdes
3.	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				
1.	IPG	65,72	61,72	61,53*	BPPKB
2.	IDG	70,16	55,16	51,91*	BPPKB
3.	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	57,54	45,54	45,54	BPPKB
4.	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	15	10	16	BPPKB
5.	Sumbangan pendapatan	41,17	29,17	29,17	BPPKB

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	perempuan dalam keluarga				
6.	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	BPPKB
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	100	100	BPPKB
8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	BPPKB
9.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	75	75	BPPKB
10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	80	80	BPPKB
11.	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	BPPKB
12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80	60	80	BPPKB
13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	BPPKB
4.	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>				

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	40	30	20	Bappeda

Sumber: BPPKB, Bappeda, 2015.

\*data terakhir per tahun 2013.

Indikator pencapaian Kota Layak Anak pada tahun 2015 belum dapat direalisasikan. Kota Layak Anak diukur dari 31 indikator layak anak. Kabupaten Tegal telah mengirimkan status 31 indikator layak anak kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari rilis Kota Layak Anak yang disampaikan kementerian, Kabupaten Tegal tidak terdapat dalam daftar Kota Layak Anak. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kota Layak Anak adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan indikator-indikator Kota Layak Anak yang tersebar di sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, catatan sipil, perhubungan hingga bencana. Sehubungan dengan hal tersebut akan diinisiasi penyusunan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 sehingga pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat lebih sinergis lagi.

Jumlah pelaksanaan KLA di kecamatan yang terealisasi sebanyak 4 kecamatan dari target 3 kecamatan, atau telah memenuhi target. Kecamatan yang telah dinisiasi layak anak ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas Layak Anak dan inisiasi Desa Layak Anak adalah Kecamatan Adiwerna, Pangkah, Slawi dan Lebaksiu. Sementara jumlah forum anak yang aktif baru terealisasi 3 forum dari target 4 forum. Forum anak yang aktif adalah Forum Anak Kabupaten Tegal dan Forum Anak Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Sementara desa yang telah diinisiasi layak anak sebanyak 4 desa yaitu Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna, Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah dan Desa Yomani Kecamatan Lebaksiu.

Untuk indikator kinerja jumlah pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terealisasi 78 pengaduan dari target 50 pengaduan. Dari 78 kasus ini, 27 kasus diantaranya adalah kekerasan pada anak. Dari 78 KDRT yang dilaporkan, 48 kasus berupa kekerasan fisik, 24 kasus kekerasan seksual, 2 kasus kekerasan psikis, dan 4 kasus kekerasan/penelantaran ekonomi. Membaca indikator ini perlu cermat, bahwa tujuan indikator bukan memperbanyak atau merencanakan kasus yang lebih banyak, namun memperbanyak kasus yang dilaporkan. Saat ini KDRT seperti fenomena gunung es yang banyak tidak dilaporkan. Pelaporan KDRT menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menurunkan KDRT itu sendiri.



Secara umum, kendala dalam pelaksanaan PPT adalah belum optimalnya pemahaman Tim PPT terhadap tugas dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; belum tercukupinya sarana mobilitas pendampingan korban; belum tersedia sarana dan prasarana yang nyaman bagi korban kekerasan; belum terdapat kelengkapan peralatan tes DNA; belum membudayanya pemahaman masyarakat tentang UU No. 23 Tahun 2004 dan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), belum terbentuk PPT Kecamatan; belum tersedia shelter (rumah aman) bagi korban kekerasan; belum terdapat fasilitas trauma center di RS dan belum optimalnya peran rohaniawan pendamping korban karena korban lebih banyak didampingi psikolog.

Untuk indikator jumlah SKPD melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terealisasi sebanyak 30 SKPD dari target 10 SKPD. Capaian kinerja ini dihitung dari jumlah SKPD peserta pelatihan PPRG. Bila diukur dari jumlah SKPD menetapkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget System* (GBS) perlu dilakukan perhitungan yang lebih akurat lagi.

Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang dari 30% target yang direncanakan dapat tercapai 20 %. Hal ini karena sebagian peserta musrenbang adalah kades/lurah dan aparatnya yang sebagian besar laki-laki. Untuk itu rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan mengundang komponen masyarakat dari unsur perempuan pada Musrenbang yang akan datang.

## URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari 9 program dan 17 indikator kinerja dan diampu oleh BPPKB dan Dinsosnakertrans. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**Tabel 3.15**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
<b>1.</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				
1.	Peserta KB aktif	287.800	236.775	213.473	BPPKB
2.	Persentase DO	10,13	16,29	12,90	BPPKB
3.	Persentase Unmeet Need	13,77	14,17	14,92	BPPKB
<b>2.</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>				
1.	Jumlah sosialisasi KRR	300	300	200	BPPKB
<b>3.</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>				
1.	jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	65	57	55	BPPKB
<b>4.</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>				

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	Rasio Akseptor KB	97,10	79,88	70,97	BPPKB
2.	Cakupan anggota UPPKS ber-KB	87,00	83,50	81,77	BPPKB
3.	Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	100	100	95	BPPKB
<b>5.</b>	<b>Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat</b>				
1.	Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	80	60	60	BPPKB
2.	Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	1	1	1	BPPKB
<b>6.</b>	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>				
1.	Jumlah Pusat Konseling KRR	1	1	1	BPPKB
<b>7.</b>	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS</b>				
1.	Jumlah pengidap Narkoba	372	342	25	Dinsosnakertrans
2.	Jumlah pengidap PMS	476	441	N/A	Dinsosnakertrans
3.	Jumlah Pengidap HIV/AIDS	189	168	20	Dinsosnakertrans
<b>8.</b>	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>				
1.	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	3	BPPKB
<b>8.</b>	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>				
1.	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	3	BPPKB
<b>9.</b>	<b>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</b>				
1.	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	92	36	36	BPPKB

Sumber: BPPKB; Dinsosnakertrans, 2015.

Jumlah peserta KB aktif terealisasi sebanyak 213.473, masih di bawah target sebanyak 236.775. Sementara persentase DO (Peserta KB yang berhenti) telah sesuai target, yaitu menurun dari target 16,29% menjadi 12,90%. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk Ber-KB yang masih tinggi. Selain itu jumlah tempat pelayanan kontrasepsi tersedia relatif banyak, 55 tempat meskipun masih di bawah target sebanyak 57

tempat. Tempat pelayanan kontrasepsi tersebar di puskesmas, rumah bersalin, rumah sakit dan klinik bidan praktik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KB antara lain ketersediaan Penyuluh KB (PKB) yang terbatas. Dari jumlah yang terbatas itu hampir setiap tahun terdapat PKB yang pensiun dan tidak segera mendapat tambahan PKB baru. Keberadaan PKB dibantu dengan keberadaan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Kader PPKBD di desa. Indikator cakupan PPKBD dan Sub PPKBD aktif telah teralisasi sebesar 60%, telah memenuhi target sebesar 60%. Begitu juga rasio kader KB pada PPKBD dan Sub PPKBD telah terpenuhi, yaitu 1 kader untuk 1 PPKBD dan Sub PPKBD.

Untuk inidikator jumlah BKB-Posyandu-PAUD terintegrasi terealisasi 36 BKB, atau telah memenuhi target pada tahun 2015 sebanyak 36 BKB. Saat ini di setiap kecamatan telah terdapat minimal 1 BKB yang telah terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD. Permasalahan yang dihadapi adalah hubungan kelembagaan di desa yang seringkali kurang harmonis. Beberapa desa cenderung mengalokasikan anggaran untuk PAUD atau Posyandu saja, masih kurang memperhatikan anggaran untuk BKB.

## URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial diampu oleh Dinsosnakertrans. Urusan Sosial terdiri dari 7 program dan 22 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Sosial tahun 2015.

**Tabel 3.16**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPDP Tahun 2015**  
**Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
<b>1.</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>				
	1. Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100	Dinsosnakertrans
	2. Persentase PMKS ditangani	30	26	62	Dinsosnakertrans
	3. Jumlah perintis kemerdekaan/warak awuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	350	150	250	Dinsosnakertrans
	4. Persentase perintis kemerdekaan/warak awuri dan veteran pejuang yang	8,2	4,2	32,13	Dinsosnakertrans

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	mendapat pelayanan sosial				
<b>2.</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				
1.	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30	26	1,95	Dinsosnakertrans
<b>3.</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>				
1.	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450	250	384	Dinsosnakertrans
2.	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	16	7,4	11,73	Dinsosnakertrans
<b>4.</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>				
1.	Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	350	150	213	Dinsosnakertrans
2.	Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	7,2	3,2	2,46	Dinsosnakertrans
<b>5.</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>				
1.	Jumlah panti asuhan/panti jompo	24	21	20	Dinsosnakertrans
2.	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	24	21	20	Dinsosnakertrans
<b>6.</b>	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>				
1.	Jumlah lansia terlantar yang direhabilitasi	70	35	5	Dinsosnakertrans
2.	Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi	12,2	8,2	0,17	Dinsosnakertrans
3.	Jumlah pengidap	50	25	25	Dinsosnakertrans

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	narkoba yang direhabilitasi				
4.	Persentase pengidap narkoba yang direhabilitasi	14,5	10,3	47,17	Dinsosnakertrans
5.	Jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi	170	86	0	Dinsosnakertrans
6.	Jumlah/persentase pengidap PMS yang direhabilitasi	7,2	3	0	Dinsosnakertrans
7.	Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	50	20	20	Dinsosnakertrans
8.	Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	8,2	3,2	N/A	Dinsosnakertrans
9.	Jumlah eks WTS yang diberdayakan	50	25	58	Dinsosnakertrans
10.	Persentase eks WTS yang diberdayakan	9,8	5,2	68,24	Dinsosnakertrans
<b>7.</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>				
1.	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	300	175	3.121	Dinsosnakertrans

Sumber: Dinsosnakertrans, 2015.

Capaian kinerja Persentase korban bencana yang ditangani ditargetkan sebesar 100% telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014–2019. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dan koordinasi yang baik antara BPBD PMI dan unsur terkait serta kesiapsiagaan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi terjadinya bencana, adanya jalur evakuasi yang jelas dan sistem peringatan dini dalam masyarakat sehingga terdapat 43 kejadian bencana dengan jumlah korban 7.026 jiwa yang dapat ditangani 100%.

Capaian kinerja Persentase PMKS yang ditangani ditargetkan sebesar 26% telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan karena adanya penanganan PMKS kerjasama antara pusat, daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Tegal diantaranya pelatihan–pelatihan tata boga sebanyak 275 WRSE, 120 keluarga rawan sosial ekonomi yang mendapat bantuan usaha ekonomi produktif, pelatihan tata rias bagi 40 WRSE, pelatihan Bordir bagi 60 WRSE, 20 WRSE mengikuti pelatihan menjahit, 40 keluarga rawan sosial ekonomi mengikuti pelatihan teknis HP dan stir mobil, serta 50 kelompok mendapat bantuan KUBE APBN Kemensos.

Selain itu masih terdapat 35 anak mengikuti pelatihan menjahit, 35 anak mendapat pelatihan montir, 97 anak mendapat pelayanan sosial di Baresos Putra Harapan Slawi, 20 anak mengikuti pelatihan montir di Bumijawa dan Tarub, 34 anak mendapat pelayanan sosial di Baresos Wira Adi Karya Ungaran, 61 anak mendapat pelayanan sosial di Sukomulyo Tegal, 2 anak berhadapan dengan hukum dikirim ke Panti Sosial Marsudi Putra Magelang. Terdapat pula 150 orang menerima bantuan sesuai jenis kecacatan melalui Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) di Kec. Dukuhwaru, dan Bojong dari APBD Provinsi Jateng, 45 orang mengikuti pelatihan di UPTD LBK (menjahit, membatik dan *handycraft*), 16 orang mendapat alat bantu disabilitas (kaki palsu 10 buah dan 6 kursi roda), 2 orang mengikuti pelatihan di Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa Temanggung.

Dilakukan pula pengiriman 49 eks psykotik ke RSJ Magelang dan 16 PGOT dirujuk ke Baresos Sameko Karti Pemalang. 5 orang lansia terlantar dikirim ke Baresos Purboyuwoso Brebes dan 30 orang lansia terlantar tidak mau dirujuk ke Baresos karena alasan keluarga. 25 orang pengidap narkoba mengikuti bimbingan dari Dinas Sosial Provinsi Jateng dan mendapat bantuan UEP. 20 orang pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi dan mendapat bantuan nutrisi. 40 orang eks WTS Karanggondang mengikuti pelatihan tataboga dan menjahit dan 18 orang eks WTS yang direhabilitasi ke Baresos Wanita Utama Surakarta.

Sebanyak 16.717 RTSM juga mendapatkan bantuan PKH, 90.668 RTSM yang mendapatkan Raskin dan 100 anak yang mengikuti pembinaan Penarikan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA PKH). Dari keseluruhan jumlah tersebut masuk ke dalam kriteria PMKS sebesar 115.816 orang sedangkan jumlah PMKS tahun 2015 sejumlah 186.977 orang, sehingga realisasi PMKS yang ditangani adalah 62 %.

Capaian kinerja Persentase PMKS yang direhabilitasi sosial ditargetkan sebesar 26% hanya tercapai 1,95%. Hal ini dikarenakan jumlah PMKS yang direhabilitasi terbatas hanya pada PMKS yang dikirim ke balai-balai besar sosial dan kebanyakan setelah dijaring untuk dikirim ternyata dari pihak keluarga berkeberatan.

Capaian kinerja Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial ditargetkan sebesar 7,4% terealisasi sebesar 11,73 %. Hal ini disebabkan karena jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial sejumlah 384 anak sedangkan jumlah ketelantaran tahun 2015 sejumlah 3.274 anak.

Capaian kinerja Persentase penyandang cacat (Difabel) yang direhabilitasi sosial ditargetkan sebesar 3,2% terealisasi sebesar 2,46%. Hal ini disebabkan karena dari jumlah kecacatan sebanyak 8.655 orang di tahun 2015 hanya direhabilitasi hanya sejumlah 213 orang karena keterbasan anggaran.

Capaian kinerja Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina ditargetkan sebanyak 21 panti tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPKMD Tahun 2014–2019, karena panti asuhan/panti jompo yang dibina hanya 20 panti. Hal ini disebabkan karena Panti Asuhan Putra Harapan Slawi yang semula dijadikan Panti Asuhan milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beralih fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Suko Mulyo Putra Harapan Slawi.

Capaian kinerja Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi sebesar ditargetkan sebesar 8,2% hanya terealisasi 5 orang dari jumlah lansia terlantar 2.861 orang atau hanya 0,17%. Hal ini dikarenakan dalam proses rehabilitasi harus memiliki NIK dan kelengkapan administrasi kependudukan lainnya serta dari pihak keluarga yang merasa keberatan. Capaian kinerja Persentase Pengidap narkoba yang direhabilitasi ditargetkan sebesar 10,3% terealisasi 25 orang (47,17%) yang direhabilitasi dan mendapatkan UEP dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dari jumlah pengidap Napza tahun 2015 sebanyak 53 orang. Capaian kinerja Jumlah Pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi sebanyak 20 orang terealisasi 20 orang yang mendapatkan bantuan nutrisi.

Capaian kinerja Persentase Eks WTS yang diberdayakan ditargetkan sebesar 5,2 %, terealisasi 58 orang (68,24%) dari jumlah 85 orang WTS. Capaian kinerja Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina Tahun 2015 sebanyak 3.121 PSKS (Pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, tagana, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, keluarga pioneer, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, TKSK, dunia usaha, orsos/panti asuhan dan orsos non panti asuhan) telah melebihi target sebanyak 175 kelompok peduli kesejahteraan sosial.

## URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja diampu oleh Dinsosnakertrans, terdiri dari 6 program dan 18 indikator. Berikut indikator, terget dan capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2015.

**Tabel 3.17**  
**Evaluasi Kinerja Program RPKDTahun 2015**  
**Urusan Tenaga Kerja**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>				
1.	Penempatan AKAD	13.000	11.750	2.800	Dinsosnakertrans
2.	Penempatan AKAN	8.300	7.115	371	Dinsosnakertrans
3.	Penempatan AKL	300.000	150.000	4.910	Dinsosnakertrans
4.	Jumlah infrastruktur BKL	40	31	27	Dinsosnakertrans

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
5.	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	58	40	150	Dinsosnakertrans
6.	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	65	45	42	Dinsosnakertrans
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>				
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	4,26	6,04	Dinsosnakertrans
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	88,02	71,06	79,62	Dinsosnakertrans
3.	Tingkat Kesempatan Kerja	96,15	93,11	93,96	Dinsosnakertrans
4.	Jumlah LPKS	60	48	51	Dinsosnakertrans
5.	Jumlah Bursa Kerja Khusus	52	45	53	Dinsosnakertrans
6.	Jumlah PPTKIS	18	10	8	Dinsosnakertrans
7.	Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS	65	30	150	Dinsosnakertrans
8.	Jumlah pelatihan tenaga kerja siap pakai	10	2	-	Dinsosnakertrans
<b>3.</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>				
1.	Persentase UMR: KHL	100	100	100	Dinsosnakertrans
2.	Jumlah Sengketa Industrial	8	14	14	Dinsosnakertrans
3.	Jumlah sengketa industrial ditangani	8	14	14	Dinsosnakertrans
4.	Jumlah sidak/pengawasan ketenagakerjaan	300	180	150	Dinsosnakertrans
5.	Jumlah pengawas tenaga kerja	5	3	3	Dinsosnakertrans

Sumber: Dinsosnakertrans, 2015.

Capaian kinerja Penempatan AKAD belum mencapai target dikarenakan penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Kabupaten Tegal namun demikian tidak semua BKK melaporkan hasilnya. Sementara Penempatan AKAN belum mencapai target dikarenakan penempatan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) yang terdata di Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal hanya yang bekerja di darat yang penyalurannya melalui PPTKIS. Adapun jumlah tenaga kerja yang menjadi TKI pelaut sebenarnya mencapai jumlah ribuan akan tetapi tidak terdata dikarenakan dari pihak perusahaan tidak melaporkan hasil perekrutannya. Sedangkan penempatan AKL belum mencapai target dikarenakan jumlah investasi di Kabupaten Tegal terbatas dan banyak perusahaan tidak melaporkan jumlah perekrutan karyawan baru.

Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah Angkatan Kerja dikali 100, yaitu  $53.808:891.014 \times 100 = 6,04\%$ . TPT masih tinggi dikarenakan perusahaan besar di Kabupaten Tegal masih terbatas. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas



dikali 100, yaitu  $891.014:1.119.139 \times 100 = 79,62\%$ . Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja adalah jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100, yaitu  $837.206:891.014 \times 100 = 93,96\%$ .

Capaian kinerja Persentase UMR:KHL Tahun 2015 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil survei sesuai dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei KHL dan Pentahapan Pencapaian KHL yaitu sebesar Rp. 1.150.000,-Rp. 1.150.000,-

Capaian kinerja Sengketa Industrial yang ditangani Tahun 2015 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Berdasarkan jumlah pengaduan perselisihan Hubungan Industrial antara Perusahaan dengan Pekerja yang telah masuk dan ditangani oleh Dinsosnakertrans sebanyak 14 kasus.

## URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari 5 indikator dan 2 program. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diampu oleh Dinkop, UKM, Pasar. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**Tabel 3.18**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan dan Usaha Kecil Menengah**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>				
1.	Jumlah pelatihan kewirausahaan	4 kali	4 kali	1 kali	Dinkop, UKM, pasar
2.	Jumlah Wirausahawan Baru	35 UKM	15 UKM	30 UKM	Dinkop, UKM, pasar
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>				
1.	Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan	1.830 UKM	1.800 UKM	N/A	Dinkop, UKM, pasar
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>				
1.	Jumlah Koperasi Aktif	425 Koperasi	300 Koperasi	291 Koperasi	Dinkop, UKM, pasar
2.	Jumlah BPR dan LKM aktif	595	575	11 BPR dan 1	Dinkop, UKM, pasar

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
				LKM	

Sumber: Dinkop, UKM, Pasar, 2015.

Jumlah pelatihan kewirausahaan masih di bawah target, dari yang direncanakan sebanyak 4 kali hanya teralisasi 1 kali. Meskipun demikian jumlah wirausahawan baru yang direncanakan sebanyak 15 UKM terealisasi sebanyak 30 UKM. Pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, jumlah UMKM mengakses kredit perbankan tidak dapat disajikan karena Dinkop UKM Pasar belum pernah melakukan pendataan ke bank-bank yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu ke depan Dinkop UKM Pasar perlu lebih proaktif melakukan pendataan pada bank-bank yang ada, tidak hanya menunggu laporan dari bank yang memang selama ini tidak pernah dilaporkan oleh bank.

Indikator jumlah koperasi aktif pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 300 koperasi, hanya 291 koperasi yang aktif ditandai dengan aktivitas dan pelaksanaan RAT masing-masing koperasi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan lebih intensif oleh Dinkop, UKM, Pasar untuk mendorong kinerja koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tegal. Koperasi-koperasi yang tidak aktif ini karena tidak memiliki daya saing dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Pembinaan oleh Dinkop, UKM, Pasar perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing koperasi-koperasi yang tidak aktif ini. Untuk jumlah BPR di Kabupaten Tegal sebanyak 11 unit, 2 BPR milik Pemkab Tegal dan 9 BPR milik swasta. Sementara jumlah LKM sesuai UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdapat 1 LKM, yaitu Koperasi LKM Arta Surya.

## URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 program dengan 9 indikator. KPM dan BP2T adalah SKPD yang mengampu Urusan Penanaman Modal. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penanaman Modal.

**Tabel 3.19**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPMD Tahun 2015**  
**Urusan Penanaman Modal**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>				
1.	Jumlah investor PMA	4	2	N/A	KPM
2.	Jumlah investor PMDN	3070	3.050	N/A	KPM
3.	Jumlah nilai investasi PMA	48 Milyar	41 Milyar	N/A	KPM
4.	Jumlah nilai investasi PMDN	835.500.000	754.269.500	N/A	KPM

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
		Ribu	ribu		
5.	Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN	6.670	2.670	N/A	KPM
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>				
1.	Jumlah ijin usaha dikeluarkan	6.200	5.800	5.263*	BP2T
<b>3.</b>	<b>Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>				
1.	Jumlah aparatur yang kompeten	27	23	N/A	KPM
2.	Jumlah sistem informasi investasi	1	1	N/A	KPM
<b>4.</b>	<b>Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan</b>				
1.	Survei Indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	BP2T

Sumber: KPM; BP2T, 2015.

\*Data per November 2015.

Capaian Kinerja Tahun 2015 pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi berupa Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan diprediksi tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2015 yaitu 5.800 Izin Usaha sedangkan pencapaian Target Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tegal Per November 2015 telah mencapai 5.263 Izin Usaha dan diprediksi target kinerja tercapai pada bulan Desember 2015.

Capaian Kinerja Tahun 2015 pada Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan berupa Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Perizinan telah tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2015 yaitu 1 Kali Kegiatan Per Tahun. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tegal telah melaksanakan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 berkerjasama dengan CORRDEV Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga pada tanggal 9 November s.d 8 Desember 2015.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah penyelenggaraan pameran investasi; penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk tata cara pengaduan; penelitian kepuasan masyarakat serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah Belum bergabungnya instansi penanaman modal dan PTSP sehingga pelaporan, pengawasan serta promosi belum dapat dikoordinasikan dalam satu atap; masih banyaknya calo yang mengurus izin sehingga berimbas pada membengkaknya biaya dan waktu; belum adanya sistem informasi dan SDM

yang mumpuni sehingga Informasi yang diperoleh masyarakat harus melalui kantor BP2T, belum dapat diakses melalui *website* atau *SMS Gateway*.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan antara lain segera menggabungkan instansi penanaman modal dan BP2T agar terwujud PTSP yang benar-benar pelayanan satu pintu; BKD agar mengalokasikan SDM yang berkualitas, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta membuat aplikasi sistem informasi agar masyarakat dapat mengakses informasi perizinan dengan mudah.

## URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan terdiri dari 3 program dan 11 indikator kinerja. Urusan Kebudayaan diampu oleh Disparbud. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2015

**Tabel 3.20**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Kebudayaan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				
1.	Jumlah pertunjukan seni	3	3	4	Disparbud
2.	Jumlah pameran seni	1	1	0	Disparbud
3.	Jumlah misi/muhibah kesenian	1	0	2	Disparbud
4.	Jumlah sarana pertunjukan seni	19	1	2	Disparbud
5.	Jumlah pelaku seni yang dibina	3.110	3.110	90	Disparbud
6.	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	397	327	70	Disparbud
7.	Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	4	4	2	Disparbud
8.	Jumlah maestro seni	3	1	1	Disparbud
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				
1.	Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3	3	7/1	Disparbud
2.	Jumlah naskah kuno yang dikaji	1	1	1	Disparbud
<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				
1.	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2	2	0	Disparbud

Sumber: Disparbud, 2015.

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan menunjukkan variasi. Indikator kinerja yang berhasil mencapai target diantaranya jumlah pertunjukan seni sebanyak 4 kali, dari target sebanyak 3 kali. Begitu juga BCB dan situs budaya yang dibangun sebanyak 7 dan direhabilitasi sebanyak 1, sementara target kinerja hanya 3. Meski demikian jumlah pelaku seni yang dibina dan jumlah kelompok kesenian yang dibina masih jauh di bawah target. Dari target 3.110 pelaku seni dibina, teralisasi hanya 90 saja. Sementara jumlah kelompok

kesenian yang dibina, terealisasi 70 dari target 327 kelompok kesenian yang dibina. Untuk itu diharapkan peran serta aktif masyarakat untuk memasyarakatkan seni dan budaya di Kabupaten Tegal. Terlebih kebudayaan merupakan salah satu misi dalam RPJMD tahun 2014-2019.

## URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga diampu oleh Disdikpora. Urusan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 4 program dan 10 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga.

**Tabel 3.21**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPDTahun 2015**  
**Urusan Pemuda dan Olahraga**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>				
	1. Jumlah pelatihan pemuda	9	5	0	Dindikpora
	2. Jumlah pemuda yang dilatih	450	250	0	Dindikpora
	3. Jumlah pemuda pelopor	252	144	108	Dindikpora
	4. Jumlah organisasi pemuda dibina	33	21	4	Dindikpora
2.	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>				
	1. Jumlah pelatihan kewirausahaan	1	1	1	Dindikpora
3.	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>				
	1. Jumlah kompetisi olahraga amatir	28	16	1	Dindikpora
	2. Jumlah kompetisi olahraga profesional	18	6	0	Dindikpora
	3. Jumlah atlet dibina	215	195	30	Dindikpora
4.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>				
	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	181 unit	80 unit	12	Dindikpora
	2. Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik	816	800	107	Dindikpora

Sumber: Disdikpora, 2015.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program jumlah pemuda pelopor dan jumlah organisasi pemuda yang dibina masih berada di bawah target capaian, yaitu 0 berbanding 5 dan 250. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemuda pelopor dalam pembangunan masyarakat desa. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan motivasi serta pembinaan kepada pemuda di Kabupaten Tegal.

Sementara untuk jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target capaian, yaitu 1 kali pelatihan dari target kinerja sebanyak 1 kali pelatihan juga. Meski demikian

kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kewirausahaan sedikit menghambat pelaksanaan program untuk lebih optimal lagi.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga belum memenuhi target capaian tahun 2015. Jumlah atlet yang dibina baru sebanyak 30 atlet, masih jauh di bawah target yaitu 195 atlet. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga masih kurang; perkembangan prestasi pemuda dan olahraga stagnan; belum optimalnya pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga masyarakat; penghargaan pada atlet yang berprestasi; serta fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat agar pembangunan bidang olah raga di Kabupaten Tegal dapat lebih semarak lagi.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di tahun 2015 juga belum mencapai target capaian. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik ditarget sebanyak 800 unit namun baru teralisasi 107 unit. Perlu dilakukan fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga masyarakat sehingga olahraga dapat menjadi kegiatan positif yang berkembang di masyarakat.

## URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh BPBD dan Kesbangpolinmas. Urusan ini terdiri dari 7 program dan 34 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2015.

**Tabel 3.21**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				
	1. Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1:59;37	1:59,41	1:110	Kesbangpol inmas
	2. Rasio Linmas Terlatih	5,00	1,00	1,00	Kesbangpol inmas
2.	<b>Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>				
	1. Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam)	60	12	4	Kesbangpol inmas
3.	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>				

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	Jumlah dialog umat beragama	1	1	1	Kesbangpol inmas
2.	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	1	0	0	Kesbangpol inmas
4.	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				
1.	Jumlah dialog wawasan kebangsaan	1	1	1	Kesbangpol inmas
2.	Jumlah kerjasama umat beragama	1	1	1	Kesbangpol inmas
5.	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>				
1.	Cakupan siskamling dengan jumlah desa	75	55	55	Kesbangpol inmas
6.	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>				
1.	Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas	100,00	50,00	0	Kesbangpol inmas
2.	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif	70,00	62,06	0	Kesbangpol inmas
3.	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden	70,00	62,88	0	Kesbangpol inmas
4.	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur	70,00	42,77	0	Kesbangpol inmas
5.	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati	70,00	57,88	0	Kesbangpol inmas
6.	Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades	90,00	90,00	0	Kesbangpol inmas
7.	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>				
1.	Jumlah kegiatan mitigasi bencana	1	1	7	BPBD
2.	Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana	8	8	8	BPBD

Sumber: Kesbangpolinmas; BPBD, 2015.

Indikator rasio Linmas per 10.000 penduduk pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat telah tercapai melebihi target. Jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2014 sebanyak 1.420.132 jiwa, terdiri dari 706.001 laki-laki dan 714.131 perempuan. Dari jumlah tersebut, setiap 10.000 penduduk terdapat 110 orang linmas, karena jumlah Linmas saat ini sebanyak 11.000 orang. Untuk indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) terealisasi 4 laporan dari

target 12 laporan. Hal ini karena pelaporan dilakukan setiap triwulan, sehingga dalam satu tahun hanya terdapat 4 laporan.

Indikator-indikator yang berhubungan dialog dan kerjasama umat beragama telah tercapai sesuai target. Keberadaan lembaga-lembaga seperti FKUB, Polres, Kodim, BPPKB, Kemenag, dan Bag. Kesra Setda rutin melakukan pertemuan untuk mewujudkan budaya rukun dan toleran di masyarakat. Terkait keberadaan ormas, dihadapi kendala pendataan karena tidak semua ormas mendaftarkan apabila terjadi pergantian kepengurusan. Sementara untuk indikator-indikator terkait hak pilih tidak ada realisasinya karena pada tahun 2015 tidak diselenggarakan Pilpres, Pileg, Pilkada dan Pilkadaes.

Indikator jumlah kegiatan mitigasi bencana dan jumlah kegiatan tanggap darurat bencana pada Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam telah mencapai target. Indikator jumlah kegiatan mitigasi bencana direncanakan sebanyak 1 mitigasi, pada praktiknya dilakukan 7 kegiatan mitigasi bencana, yaitu Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam bagi aparatur pemerintah desa; Pemantau an dan penyebarluasan informasi potensi lokasi rawan bencana; Pelatihan SAR penanggulangan bencana; Pengadaan peralatan dan sarana mitigasi; Peningka tan manajemen bencana aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat; Penanggula ngan resiko bencana berbasis komunitas; dan Pemasangan rambu-rambu peringatan dilokasi rawan bencana.

Sementara pada indikator jumlah kegiatan tanggap darurat bencana juga telah memenuhi target kinerja sebanyak 1 kegiatan. Kegiatan tanggap darurat bencana pada tahun 2015 sebanyak 8 kegiatan, yaitu Pemasangan jembatan belly di Desa Kertaharja Kec. Pagerbarang; Pembangunan talud di Desa Dukuhbenda Kec. Bumijawa; Pembangunan bronjong di Desa Pagedangan Kec. Adiwerna; Pembangunan bronjong di Desa Pakembaran Kec. Slawi; Pembangunan bronjong di Desa Sumingkir Kec. Kedungbanteng; Pembangunan bronjong di Desa Dukuhsalam, Kec. Slawi; Pembangunan bronjong di Desa Gumayun, Kec. Dukuhwaru; Pembangunan bronjong di Desa Pedagangan, Kec. Dukuhwaru.

#### **URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terdiri dari 15 program, 30 indikator dan diampu oleh Set DPRD, Setda, DPPKAD, Inspektorat, Dishubkominfo, dan BKD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

**Tabel 3.23**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**



**Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>				
	1. Jumlah Perda ditetapkan	Direncanakan 8 Perda	Direncanakan 8 Perda	19 Perda	Set DPRD
	2. Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda	1 bulan	1 Bulan	2 bulan	Set DPRD
	3. Jumlah Perda inisiatif DPRD	1 perda	1 Perda	3 Naskah akademik	Set DPRD
2.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>				
	1. Jumlah koordinasi kepala daerah dengan Muspida/SKPD	60	60	0	Setda (Bag. Pem)
3.	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>				
	1. Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah	4 bulan	4 bulan	4 bulan	Setda (Bag. Org)
	2. Jumlah Standar Satuan Harga	1	1	1	Setda (Bag. Org)
	3. Jumlah peraturan tentang APBD	1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan	1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan	1 perda penetapan, 1 perda perubahan, 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran, 1 perbup perubahan, 1 perda pertanggungjawaban, 1 perbup penjabaran pertanggungjawaban, 1 perbup penatausahaan	DPPKAD
	4. Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD	1 SIMDA Keuangan	1 SIMDA Keuangan, 1 SIMPATDA	DPPKAD
4.	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>				
	1. Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa	2	2	5	Setda (Bag. Pem)

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
5.	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>				
	1. Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	144	112	104	Inspektor at
	2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	95	87	65	Inspektor at
	3. Opini WTP BPK	WTP	WDP	WDP*	Inspektor at
6.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>				
	1. Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	35 Orang	20 orang	20 orang	Inspektor at
	2. Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	4 kali	2 kali	2 kali	Inspektor at
7.	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>				
	1. Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	6	4	4	Inspektor at
8.	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>				
	1. Jumlah SIM	15	10	40	Dishubko minfo
10.	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>				
	1. Jumlah kerjasama antar daerah	10	10	3	Setda (Bag. Pem)
11.	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>				
	1. Jumlah raperda	10	10	12	Setda (Bag. Hukum)
12.	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>				
	1. Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	200 (Diklatpim II = 11, III = 36, IV = 153)	40 (Diklatpim II = 3, III = 3, IV = 34)	24 (Diklatpim II=0, III=3, IV=21)	BKD
13.	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>				
	1. Jumlah Peserta Diklat Teknis	70	50	59	BKD
	2. Jumlah Peserta Diklat Fungsional	40	20	26	BKD

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	3. Persentase jabatan struktural yang terisi	94	92	91	BKD
	4. Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	100	100	100	BKD
14.	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				
	1. Jumlah CPNS	2.000	800	374	BKD
	2. Jumlah PNS Tugas Belajar	24	24	27	BKD
	3. Jumlah kasus kepegawaian	40	50	45	BKD
	4. Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	20	23	26	BKD
	5. Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya	6	15	43	BKD
	6. Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan)	43	5	6	BKD
15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>				
	1. Persentase layanan publik sesuai SPM	100	80	N/A	Setda (Bag. Org)

Sumber: Set DPRD; Setda; DPPKAD; Inspektorat; Dishubkominfo; dan BKD, 2015.

\*Data terakhir tahun 2014.

Dari 3 indikator kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2 indikator yaitu jumlah Perda ditetapkan dan Jumlah perda inisiatif DPRD telah memenuhi target. Jumlah Perda ditetapkan sebanyak 19 Perda dari target 8 Perda pada tahun 2015. Untuk Perda inisiatif DPRD direncanakan 1 Perda dan telah disusun 3 Naskah Akademik Perda sebagai bahan penyusunan Raperda. Sementara indikator yang tidak tercapai adalah rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda dari target yang direncanakan selama 1 bulan, realisasi di lapangan selama 2 bulan. Hal ini disebabkan oleh padatnya kegiatan DPRD sehingga waktu pembahasan Perda relatif kurang.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu jumlah koordinasi kepada daerah dengan Muspida/SKPD. Dari target sebanyak 60 kali, realisasi pada tahun 2015 sebanyak 0. Hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan tentang pemberian uang representatif bagi Forkompinda yang semula dianggarkan melalui APBD namun juga dianggarkan melalui APBN sehingga APBD tidak direalisasikan karena terjadi duplikasi anggaran. Sementara untuk indikator rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah dan jumlah satuan standar harga telah sesuai dengan target kinerja, yaitu masing-masing 4

bulan dan 1 standar satuan harga. Hal ini karena perencanaan kegiatan dilakukan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan *time schedule* yang ditetapkan.

Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan sebanyak 5 pedoman pada tahun 2015, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 2 pedoman. Tidak ada permasalahan yang berarti dalam penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa. Begitu juga jumlah kerjasama daerah telah direalisasikan sesuai rencana, yaitu 3 kerjasama. Kerjasama yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Pemkab Tegal adalah kerjasama dengan Pemkab Bangka Barat Prov. Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Bangka Belitung; kerjasama antara Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jateng dan Pemkab Tegal tentang Sinergitas Penanganan PGOT; dan Nota Kesepahaman Pemkab Tegal dengan Pemkot Pekalongan tentang Pengelolaan Penyiaran Televisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV Pekalongan.

Sementara untuk indikator jumlah Raperda yang direncanakan 10 raperda telah direalisasikan sebanyak 12 Raperda. Dalam penyusunan Raperda tidak ditemukan kendala yang berarti. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Raperda adalah pembahasan dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait Raperda, *public hearing* untuk menampung aspirasi *stakeholders* dan penyampaian Raperda menjadi Prolegda di DPRD. Kendala seringkali dijumpai dalam penyusunan Prolegda karena menyesuaikan dengan dinamika kerja DPRD.

Jumlah Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direncanakan 4 peraturan dan direalisasikan sebanyak 8 peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD 2015 dari penatausahaan, penetapan, pergeseran, perubahan sampai pertanggungjawaban APBD selama tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015.

Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD, terbit beberapa kebijakan berupa Peraturan Bupati. Seperti pada tanggal 17 Desember 2015 tersusun Peraturan Bupati Tegal No. 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Tanggal 18 Desember 2015 Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Kedua Peraturan Bupati tersebut mengatur tentang penyesuaian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) versi terbaru dimana ada perubahan pada pos pendapatan dan belanja dikarenakan pada tahun 2015 sudah tidak lagi menggunakan *cash basis* tetapi menggunakan *acrual basis* yaitu Sistem pencatatan akuntansi dimana pengakuan transaksi keuangan diakui pada saat pelaksanaan kegiatan.

Target Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan RPJMD dan Renstra tahun 2014-2019 pada tahun 2015 adalah 112 obyek pemeriksaan, namun mempertimbangkan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada realisasi 104 obyek pemeriksaan, sesuai dengan SK Bupati No. 971 tahun 2014 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2015, dan target 104 obyek pemeriksaan tersebut tercapai 100 %. Walaupun target PKPT tahun 2015 hanya 104, tetapi pada hakekatnya target RPJMD tahun 2015 sebanyak 144 terlampaui. Hal ini dapat dilihat dari adanya capaian di luar PKPT berupa hasil pemeriksaan kasus/khusus (Reviu LKPD, Reviu RKA, Reviu LKJIP, kasus ) sebanyak  $104+73+54$  khusus=231 kasus.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) aparat pengawas fungsional karena sampai saat ini hanya ada 20 orang tenaga fungsional yang terdiri dari 11 orang auditor, 8 orang P2UPD dan 1 orang auditor Kepegawaian, sedangkan idealnya Inspektorat harus mempunyai 60 tenaga fungsional. Di samping itu juga perlu peningkatan kualitas SDM yang ada saat ini. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan SDM Pejabat Fungsional diambilkan dari staf fungsional umum yang dianggap mampu dan tahun depan rekrutmen SDM dari SKPD untuk di Diklat menjadi JFA.

Dalam target RPJMD dan Renstra tahun 2014-2019 untuk Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan tahun 2015 yaitu 87%, namun demikian realisasi 65% untuk TLHP Inspektorat Kabupaten Tegal, 51% untuk TLHP BPK dan 3,59% untuk TLHP Inspektorat Propinsi Jawa Tengah. Tidak tercapainya target tersebut karena komitmen SKPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan belum maksimal jadi capaian target tersebut tidak hanya ditentukan oleh Inspektorat melainkan juga komitmen/kinerja SKPD yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang dilakukan untuk Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yaitu mengadakan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik yang dilakukan langsung ke entitas (obyek pemeriksaan) maupun mengundang entitas (obyek pemeriksaan) ke Kantor Inspektorat Kabupaten Tegal.

Permasalahan yang dihadapi dalam TLHP yaitu banyaknya temuan masalah keuangan baik dari pihak ketiga (rekanan) maupun dari entitas yang diperiksa terutama kelebihan belanja pegawai /honorarium pada sekolah, dari temuan keuangan tersebut tidak dikembalikan sekaligus lunas namun dengan cara diangsur dan itu berpengaruh pada TLHP yang selesai, karena dianggap masih dalam proses. Selain itu masih ada sebagian entitas yang belum paham bagaimana mekanisme pengembaliannya. Selain itu perlu dipertimbangkan pula untuk membentuk Tim monitoring/Tim Pemantau TLHP kepada entitas baik dari SKPD, UPTD dan pemerintahan desa.

Terkait indikator kinerja opini WTP BPK bahwa dalam RPJMD dan Renstra tahun 2014-2019 target penilaian BPK dalam LKPD tahun 2015 adalah WDP, namun untuk penilaian BPK atas LKPD tahun 2015 belum bisa kami sajikan karena surat dari BPK baru kami terima sekitar bulan Juni 2016.

Target jumlah Aparatur Pemeriksa memiliki Kompetensi 20 orang dan realisasi 20 orang, sehingga sudah mencapai target, itu disebabkan ada 3 orang yang sudah lulus ujian pembentukan Auditor. Kegiatan yang mendukung yaitu adanya pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP di Bogor. Permasalahan yang ada, adalah penjadwalan diklat yang sering berbenturan dengan kegiatan yang lain, atau jadwal yang dikeluarkan oleh Pusdiklat tidak sesuai dengan kebutuhan oleh Inspektorat.

Target jumlah pelatihan Teknis aparatur pemeriksa dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2014-2019 pada tahun 2015 sebanyak 2 kali dan realisasi pelaksanaan 2 kali, sehingga sudah mencapai target. Adapun jenis pelatihan yaitu Reviu LKPD berbasis akrual bertempat di Hotel Duta Wisata Guci pada tanggal 9-10 Nopember 2015 yang diikuti oleh 40 orang, dan Bintek Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Bagi Pejabat Fungsional P2UPD yang bertempat di Hotel Grandasia Jakarta pada tanggal 18-21 Nopember 2015 yang dikuti oleh 5 orang.

Dalam RPJMD dan Renstra Inspektorat tahun 2014-2019 target jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan pada tahun 2015 sebanyak 4 kebijakan/pedoman dan realisasinya 4 kebijakan/pedoman sehingga pada tahun 2015 sudah sesuai target. Adapun kebijakan/pedoman prosedur pengawasan yaitu SK Bupati tentang PKPT, Piagam Audit Intern, Perbub Tentang Kode Etik APIP dan Perbub tentang Gratifikasi. Dengan makin bertambahnya jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal berupaya menata diri agar menjadi Inspektorat yang mempunyai kompetensi.

Indikator jumlah peserta diklat kepemimpinan, hanya Diklatpim III yang terealisasi sesuai target, yaitu 3 peserta dari target 3 peserta juga. Sementara Diklatpim II tidak terealisasi karena masih terdapat 5 jabatan pimpinan tinggi pratama/Eselon II yang kosong dan akan dan telah diisi melalui seleksi terbuka. Karena harus melalui proses seleksi terbuka yang membutuhkan waktu, alokasi anggaran Diklatpim II dialihkan untuk pengiriman peserta Diklatpim III dan IV.

Sementara untuk diklat teknis dan fungsional telah terealisasi di atas target, yaitu 59 peserta diklat teknis dari target 50 peserta dan 26 peserta diklat fungsional dari 20 target peserta diklat fungsional. Meskipun demikian alokasi anggaran diklat yang tersebar di seluruh SKPD menjadi kendala dalam mengalokasikan diklat-diklat teknis dan fungsional yang memang benar-benar dibutuhkan. Karena itu BKD mengusulkan agar pengalokasian

anggaran diklat dikelola oleh BKD sebagai SKPD pengampu kediklatan sesuai tupoksinya. Dalam upaya melakukan manajemen ASN yang baik, BKD selaku SKPD yang memiliki tupoksi pembinaan kepegawaian merencanakan untuk menyelenggarakan Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) untuk memetakan kebutuhan diklat masing-masing SKPD.

Untuk pejabat struktural yang dinilai kompetensinya direncanakan sebanyak 15 orang terealisasi sebanyak 43 orang. Penilaian kompetensi pejabat struktural dilakukan melalui Tes PCAP. Namun dengan adanya ketentuan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama/Eselon II maka Tes PCAP tidak lagi relevan. Meskipun demikian pada seleksi terbuka jabatan tinggi pratama/Eselon II tetap terdapat penilaian kompetensi oleh *assesment center* pada tahap IV seleksi.

Jumlah CPNS pada tahun 2015 direncanakan sebanyak 800 orang, namun baru terealisasi sebanyak 374 orang, CPNS pengangkatan tahun 2013 dan 2014. Realisasi yang masih rendah ini disebabkan oleh kebijakan penundaan pengadaan CPNS pada tahun 2015 sesuai Surat MenPAN dan RB Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015.

Jumlah kasus kepegawaian ditargetkan 50 kasus dan berhasil dicapai di bawah target sebanyak 45 kasus. Meski demikian jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin sebanyak 26 orang (11 orang mendapat SK Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, 4 orang mendapat SK Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan 11 orang mendapat SK Disiplin Tingkat Berat) dari target sebanyak 23 orang. Indikator jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin diharapkan terus menurun menunjukkan tingkat kedisiplinan pegawai. Namun realitasnya, capaian kinerja indikator ini justru di atas target sehingga menunjukkan bahwa disiplin pegawai di Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan lagi.

Untuk indikator jumlah fungsional baru (non guru dan kesehatan) telah terealisasi sebanyak 8 orang dari targets sebanyak 5 orang. Fungsional baru yang telah diangkat adalah auditor ahli 2 orang, mediator hubungan industrial ahli 1 orang, penyuluh perindustrian ahli 3 orang dan perencana ahli 2 orang. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan capaian kinerja indikator ini adalah minat PNS untuk menjadi fungsional masih rendah. Hal ini dimungkinkan karena ketidaktahuan maupun karena jabatan fungsional dipandang tidak menarik dalam hal gaji, tunjangan daerah dan fasilitas yang diterima.

## **URUSAN KETAHANAN PANGAN**

Urusan Ketahanan Pangan diampu oleh KKP, terdiri dari 1 program dan 12 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2015.

**Tabel 3.24**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Ketahanan Pangan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan</b>				
	1. Jumlah sistem informasi pasar	1	1	1	KKP
	2. Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.000	2.000	2.224	KKP
	3. Penguatan cadangan pangan	150,4	150,0	210,3	KKP
	4. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	71	36	49,95	KKP
	5. Stabilitas harga dan pasokan pangan	75	63	78,94	KKP
	6. Skor pola pangan harapan	95	89,6	83,6	KKP
	7. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	82	70,54	KKP
	8. Penanganan daerah rawan pangan	23	19	19	KKP
	9. Peraturan daerah (Perbup) terkait ketahanan pangan	1	1	1	KKP
	10. Jumlah LDPM	7	6	6	KKP
	11. Jumlah lumbung	39	19	17	KKP
	12. Jumlah sarana prasarana pengolahan	20	15	20	KKP

Sumber: KKP, 2015

Ketersediaan energi dan protein perkapita telah di atas target, yaitu 2.224 kkal dibanding target hanya 2.000 kkal. Hal ini dapat tercapai karena kondisi geografis Kabupaten Tegal yang memungkinkan pembudidayaan buah dan komoditi peternakan. Sumbangan komoditi buah pisang misalnya, terdapat 18,83 kkal, daging sapi sebesar 181 kkal, minyak goreng kopra sebanyak 14,54 kkal dan telur ayam ras sebanyak 10 kkal. Pencapaian indikator kinerja ketersediaan energi dan protein berhubungan langsung dengan peningkatan produksi komoditas pertanian dalam arti luas. Untuk itu perlu koordinasi dan kerjasama antara dinas teknis yang membina peningkatan produksi pertanian dengan KKP sebagai instansi pembina ketahanan pangan.

Indikator penguatan cadangan pangan juga telah di atas target, yaitu 210,3 poin dibanding target sebesar 150 poin. Hal ini dapat diwujudkan karena koordinasi yang intensif dengan banyak pihak, diantaranya Distanbunhut. Distanbunhut mengembangkan varietas padi andalan yaitu Pajale dan Sri yang hasilnya baik dan menguatkan cadangan pangan Kabupaten Tegal. Capaian kinerja yang baik juga ditunjukkan oleh indikator stabilitas harga



dan pasokan pangan, dari target 63 terealisasi 78,94. Hal ini didukung oleh konsisi pasar yang stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan.

Sementara sejumlah indikator lain masih di bawah target, diantaranya skor Pola Pangan Harapan yang terealisasi 83,6% dibanding target sebesar 89,6%. Kondisi ini terjadi karena masih sedikit masyarakat yang melakukan diversifikasi pangan, dengan mengonsumsi makanan nonberas dan nonterigu. Kondisi yang masih belum ideal juga terjadi pada indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Dari target 82% terealisasi hanya 70,54%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan mengawasi obyek pengawasan, yaitu SD yang jumlahnya ratusan di Kabupaten Tegal.

## URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Bapermasdes dengan 5 program dan 23 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2015.

**Tabel 3.25**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Pemberdaya Masyarakat desa**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>				
	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif	617	508	0	Bapermades
	2. Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG	1	1	3	Bapermades
2.	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>				
	1. Jumlah pelatihan pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	1	1	0	Bapermades
	2. Jumlah gelar TTG Tingkat Nasional	1	1	1	Bapermades
	3. Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan	1	1	1	Bapermades
	4. Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi	7	7	0	Bapermades
3.	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				
	1. Jumlah desa penerima ADD	281	281	281	Bapermades

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	yang difasilitasi				
2.	Jumlah UPK	13	13	13	Bapermades
3.	Jumlah juara lomba desa	3	3	3	Bapermades
4.	Jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab Tegal	2	2	2	Bapermades
5.	Jumlah penunjang kegiatan TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal	2	2	2	Bapermades
6.	Jumlah dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (2POA)	2	2	2	Bapermades
7.	Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal	4	4	4	Bapermades
8.	Jumlah pelaksanaan Karya Bakti TNI	4	4	4	Bapermades
9.	Jumlah kader P3MD terlatih	54	54	40	Bapermades
10.	Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi	281	281	0	Bapermades
11.	Jumlah BKM	116	116	116	Bapermades
12.	Jumlah BPD	281	281	281	Bapermades
13.	Jumlah pencaangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong	1	1	1	Bapermades
14.	Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa	281	281		Bapermades
4.	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>				
1.	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	2	2	1	Bapermades
2.	Jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi	281	281	281	Bapermades
5.	<b>Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan</b>				
1.	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa	40	30	20	Bapermades

Sumber: Bapermasdes, 2015.

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat sejumlah target kinerja, diantaranya jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pedesaan ditargetkan 1 kali pada tahun 2015 terealisasi 1 kali, yaitu pelaksanaan Pameran Hari Jadi Kabupaten Tegal. Kendala dalam fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pada Pameran hari Jadi Kabupaten Tegal adalah transaksi yang terjadi tidak bersifat langsung (harus pesan terlebih dahulu) sehingga tidak dapat dikawal dampak dari fasilitasi yang dilakukan. Untuk indikator jumlah lembaga ekonomi masyarakat (UED-SP) yang difasilitasi, dari target 7 tidak ada yang

dapat difasilitasi pada tahun 2015 atau realisasinya 0. Hal ini disebabkan adanya ketentuan hibah menurut UU No. 23 Tahun 2015 yang tidak dapat dipenuhi oleh UED-SP yang ada.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa menetapkan target 1 kali pencaangan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) dan terealisasi 1 kali pada tahun 2015, yaitu di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna. Pada tahun 2016 Desa Tuwel Kecamatan Bojong menjadi tuan rumah BBRGM tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara indikator paket pelatihan keterampilan TTG terealisasi 3 dari target kinerja 1 kali. Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan pengolahan limbah/sampah rumah tangga di Kecamatan Balapulang, Slawi dan Bojong.

Indikator jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi sebanyak 281 desa, sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja target ini antara lain sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kecamatan dan desa. Sementara indikator kinerja jumlah juara lomba desa sebanyak 3 desa telah tercapai pada tahun 2015, yaitu Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat, Desa Purwahamba Kecamatan Suradadi, dan Desa Danasari Kecamatan Bojong. Namun pemenang lomba desa tingkat kabupaten ini belum memperoleh prestasi di tingkat provinsi. Hal ini disebabkan oleh salah satu penilaian utama lomba desa tingkat provinsi adalah ketersediaan data dasar keluarga di desa. Penyediaan data dasar keluarga ini membutuhkan dana yang cukup besar, sementara belum ada fasilitasi yang dilakukan Bapermasdes untuk mewujudkan data dasar keluarga ini. Sementara itu meskipun telah ditargetkan pada tahun 2015, jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi tidak dapat direalisasikan pada tahun 2015.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa dilaksanakan sebanyak 1 kali dari target sebanyak 2 kali. Pelatihan dilakukan pada bulan Juli dengan menghadirkan Sekdes dan Bendahara Desa. Sementara indikator kinerja penghasilan tetap kades dan perangkat desa yang terfasilitasi telah terlaksana sesuai target, yaitu kades dan perangkat desa di 281 desa yang dianggarkan melalui ADD. Namun masih ada kendala dalam pengalokasian penghasilan tetap bagi kades yang berstatus pejabat dan berasal dari unsur PNS. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014, pejabat kades dari PNS dapat memperoleh penghasilan tetap. Namun menurut UU ASN, ASN tidak diperkenankan menerima duplikasi gaji.

## **URUSAN STATISTIK**

Urusan Statistik diampu oleh Bappeda, terdiri dari 1 program dan 1 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Statistik.

**Tabel 3.26**

**Evaluasi Kinerja Program RKPDTahun 2015  
Urusan Statistik**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah</b>				
	1. Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan	30	6	8	Bappeda

Sumber: Bappeda, 2015.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah terdiri dari 1 indikator, yaitu jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan. Capaian kerjanya sebanyak 7 dokumen telah melebihi target kinerja sebanyak 6 dokumen. Dokumen data statistik yang dipublikasikan berupa KDA, NTP, IPM, PDRB, IHK, Profil Kecamatan, P3BM dan SIPD. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan target kinerja ini adalah kurangnya ketepatan data dalam kompilasi sehingga rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang intens dengan SKPD lain sehingga data yang diperoleh lebih tepat, komplit dan *up to date*.

**URUSAN KEARSIPAN**

Urusan Kearsipan diampu oleh Perpusarda. Indikator kinerja Urusan Kearsipan sebanyak 3, sementara programnya sebanyak 3 pula. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perpustakaan.

**Tabel 3.27  
Evaluasi Kinerja Program RKPDTahun 2015  
Urusan Kearsipan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>				
	1. Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik	54	54	4	Perpusarda
1.	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>				
	1. Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik	54	54	4	Perpusarda
1.	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>				
	1. Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip	54	20	0	Perpusarda

Sumber: Perpusarda, 2015.

Jumlah SKPD yang memiliki ruang arsip baik pada tahun 2015 baru sebanyak 4 SKPD, dari 54 jumlah SKPD di Kabupaten Tegal. Begitu juga sarana kearsipan yang berfungsi baik, hanya dapat dicapai oleh 4 SKPD dari 54 SKPD. Sementara jumlah SKPD yang melakukan digitalisasi arsip pada tahun 2015 tidak ada, termasuk Perpusarda sendiri sebagai SKPD pengampu Urusan Kearsipan di Kabupaten Tegal. Kondisi ini menunjukkan bila sistem kearsipan yang baik belum menjadi arus utama dalam pengelolaan arsip pemerintah daerah. Keberadaan Depo Arsip sesungguhnya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip dengan lebih baik lagi. Pengelolaan arsip digital perlu menjadi perhatian khusus karena di era TIK saat ini, digitalisasi informasi termasuk di dalamnya arsip menjadi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman.

## URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Program dalam Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat sebanyak 3 program dengan 5 indikator. Urusan Komunikasi dan Informasi diampu oleh Dishubkominfo. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi.

**Tabel 3.28**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Komunikasi dan Informasi**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				
	1. Jumlah layanan pemerintah secara elektronik	3	3	4	Dishubkominfo
	2. Jumlah sistem informasi/website instansi	54	52	66	Dishubkominfo
2.	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>				
	1. Jumlah pelatihan bidang TIK	1	1	0	Dishubkominfo
	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>				
	1. Jumlah kerjasama dengan media massa	6	6	6	Dishubkominfo
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi</b>				
	1. Jumlah data base aktif	28	28	65	Dishubkominfo

Sumber: Dishubkominfo, 2015.

Jumlah layanan pemerintah secara elektronik terealisasi 4 layanan dari target sebanyak 3 layanan. Layanan tersebut adalah SPSE (Sistem Pelayanan Secara Elektronik), Sistem Keuangan Daerah, e-SIMPEG (Sistem Kepegawaian) dan e-SSH (Standar Satuan Harga) yang dapat diakses oleh masyarakat. Sementara jumlah SIM dan web yang ada pada tahun 2015 telah terealisasi dibanding target yang telah ditetapkan, yaitu 66 dibanding 52 SIM dan web. SIM yang terdapat di Kabupaten Tegal adalah SIMDA, SIMPEG (SIM Pegawai), SIMPUS (SIM Puskesmas), SIMPERPUSARDA (SIM Perpustakaan Daerah), SIMWAS (SIM Pengawasan/Inspektorat), SIM Gaji (DPPKAD), SISMIO (Obyek Pajak), SIRUP (SIM Rencana Umum Pengadaan), LPSE, E-PROCUREMENT (Aplikasi LPSE/pengadaan barang/jasa/SPSE), SIM Angkutan, JDIIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum-Bag. Hukum Setda), SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan-Disdukcapil), SIM Rumkit (SIM Rumah Sakit), SIMPATDA (SIM Pendapatan Daerah-DPPKAD), SIM BMD (SIM Barang Milik Daerah-DPPKAD), e-SIMPEG (BKD), e-HUDIS (Hukuman Disiplin-BKD), e-KGB (Kenaikan Gaji Berkala-BKD), e-PUPNS (e-Pendataan Ulang PNS-BKD) SIPPD (Bappeda), SISMONTAPRA (Sistem Monitoring Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran-Bappeda), 18 SIAK di Kecamatan.

Sementara web yang dikelola Dishubkominfo adalah tegalkab.go.id, dishubkominfo.go.id, Webmail, Facebook, Youtube, Twiteer, Forum Diskusi, dan web keuangan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan TIK di Kabupaten Tegal adalah ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM yang masih rendah serta budaya TIK yang belum terbangun dengan baik. Ke depan, diharapkan pembangunan TIK dapat lebih berkembang di Kabupaten Tegal, untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan kepada publik.

## PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan terdiri dari 1 program dan 9 indikator. Urusan Perpustakaan diampu oleh Perpusarda. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perpustakaan.

**Tabel 3.29**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Perpustakaan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>				
	1. Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	Perpusarda
	2. Jumlah perpustakaan	41	21	34	Perpusarda

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	desa				
3.	Jumlah perpustakaan instansi	54	54	16	Perpusarda
4.	Jumlah perpustakaan keliling	2	1	1	Perpusarda
5.	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	16	8	6	Perpusarda
6.	Jumlah perpustakaan silang terpadu	6	2	4	Perpusarda
7.	Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah	40.000	25.000	39.163	Perpusarda
8.	Jumlah kunjungan perpustakaan daerah	21.600	15.840	21.393	Perpusarda
9.	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	13.200	2.640	3.594	Perpusarda

Sumber: Perpusarda, 2015.

Dari 9 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 7 indikator kinerja telah terealisasi sesuai target. Indikator jumlah perpustakaan desa terealisasi di 34 desa dari target hanya di 21 desa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya baca telah tumbuh hingga ke desa-desa. Begitu juga jumlah perpustakaan silang terpadu terealisasi 4 dari target 2 perpustakaan. Perpustakaan silang adalah layanan peminjaman buku antarperpustakaan secara periodik. Sementara untuk jumlah perpustakaan instansi dan perpustakaan rumah ibadah belum tercapai sesuai target. Dari 54 target perpustakaan instansi, telah terealisasi sebanyak 16 perpustakaan. Sedangkan perpustakaan rumah ibadah baru terealisasi 6 perpustakaan dari target 8 perpustakaan.

Jumlah kunjungan perpustakaan daerah juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Dari target 15.840 kunjungan terealisasi 21.393 kunjungan. Kunjungan perpustakaan keliling juga menunjukkan capaian yang baik, sebanyak 3.594 kunjungan dari 2.640 target kunjungan yang ditetapkan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah koleksi buku perpustakaan yang juga meningkat. Dari target 25.000 koleksi, saat ini Perpustakaan Soekarno-Hatta Kabupaten Tegal telah memiliki koleksi sebanyak 39.163 buah.

## 2) URUSAN PILIHAN

### URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian diampu oleh Distanbunhut dan DKPP. Urusan Pertanian terdiri dari 10 program dan 33 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanian pada tahun 2015.

**Tabel 3.30**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Pertanian**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>				
	1. Jumlah sistem insentif pertanian	10	5	3	Distanbunhut
	2. Jumlah petani yang terlatih pertahun	50	50	100	Distanbunhut
	3. Nilai Tukar Petani	112	108	N/A	Distanbunhut
2.	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perke bunan</b>				
	1. Jumlah pasar induk pertanian	1	0	0	Distanbunhut
	2. Jumlah promosi produk pertanian	4	4	4	Distanbunhut
	3. Jumlah petani bekerjasama dengan pelaku agribisnis	90	90	100	Distanbunhut
	4. Jumlah sarana prasarana infrastruktur pertanian	20	20	60	Distanbunhut
	5. Jumlah sistem informasi potensi pertanian	2	2	3	Distanbunhut
3.	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perke bunan</b>				
	1. Jumlah litbang/pemanfaat an litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan	3	3	3	Distanbunhut
	2. Jumlah penyuluhan TTG	4	4	4	Distanbunhut
	3. Jumlah Rumah Pintar Petani (RPP)	5	2	0	Distanbunhut
4.	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perke bunan</b>				
	1. Jumlah produksi padi (ton) (GKG)	359.538	355.538	374.096	Distanbunhut
	2. Jumlah produksi jagung (ton)	116.844	114.844	111.990	Distanbunhut
	3. Jumlah produksi bawang merah (ton)	26.841	24.841	18.354	Distanbunhut
	4. Jumlah produksi kentang (ton)	4.756	4.356	3.541	Distanbunhut
	5. Jumlah produksi cabe (ton)	5.128	4.728	2.943	Distanbunhut
	6. Jumlah produksi kelapa (ton)	1.780	1.780	1.483	Distanbunhut
	7. Jumlah produksi Cengkeh (ton)	112	104	76,61	Distanbunhut
	8. Jumlah produksi Teh (Ton)	61	36	32,66	Distanbunhut
	9. Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton)	28.350	22.100	15.513	Distanbunhut
	10. Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton)	9.531	9.471	214.810	Distanbunhut



No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
	11. Persentase RDKK yang diimplementasikan disusun tepat waktu (April)	100	100	100	Distanbunhut
5.	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>				
	1. Jumlah Penyuluh yang Lulus Sertifikasi	58	18	8	Distanbunhut
	2. Jumlah Penyuluh Swadaya	187	100	92	Distanbunhut
6.	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>				
	1. Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT	1,4	1,15	0,14	DKPP
7.	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>				
	1. Jumlah produksi daging (kg)	5.808.587	5.788.587	2.700.407	DKPP
	2. Jumlah produksi susu (liter)	719.950	715.950	137.586	DKPP
	3. Jumlah produksi telur (kg)	4.954.109	4.934.109	3.125.014	DKPP
8.	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>				
	1. Konsumsi daging (Kg/kapita/tahun)	28.960	8.960	2.232.000	DKPP
	2. Konsumsi telur (Kg/kapita/tahun)	8.056	4.056	2.231.000	DKPP
	3. Konsumsi susu (Kg/kapita/tahun)	26.474	6.474	0,098	DKPP
9.	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>				
	1. Jumlah penerapan TTG peternakan	3	1	1	DKPP
10.	<b>Program Pengembangan Peternakan</b>				
	1. Jumlah Ternak terpelihara di Taman Satwa	28	20	44	DKPP

Sumber: Distanbunhut; DKPP, 2015.

Indikator jumlah insentif pertanian pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani belum memenuhi target. Dari rencana 5 jenis insentif baru terelisasi 3 insentif pertanian pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan petani belum terbiasa dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan target produksi dan mutu produk pertanian.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri dari 5 indikator dan semuanya telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan masih dalam bentuk segar sehingga belum terdapat nilai tambah yang signifikan dinikmati petani. Jumlah petani yang bekerjasama dengan pelaku agribisnis sebagian besar masih bekerjasama dengan pelaku usaha skala kecil. Upaya yang perlu dilakukan diantaranya fasilitasi kemitraan antara petani dengan pelaku agribisnis untuk mengurangi peran tengkulak.

Indikator jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan dan jumlah penyuluhan TTG telah sesuai target yang ditetapkan, yaitu 3 untuk pemanfaatan litbang TTG pertanian dan 4 untuk penyuluhan TTG. Sementara Rumah Pintar Petani (RPP) belum terealisasi dari target 1 RPP baru tahun 2015. Pada tahun 2015 1 RPP yang ada di Lebaksiu dibentuk dan didanai APBD Provinsi Jawa Tengah.

Hampir semua indikator pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan belum mencapai target dalam RPJMD. Namun produksi padi dan jagung pada akhir tahun 2015 (desember) diprediksi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Komoditi hortikultura dan perkebunan belum mencapai target karena faktor iklim dan gangguan OPT sehingga produksi (hortikultura) dan produktivitas (perkebunan) rendah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan luas tanam, fasilitasi sarana produksi hortikultura dan peremajaan tanaman perkebunan.

Sementara untuk jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi hanya 8 penyuluh dari target 18 penyuluh. Begitu juga jumlah penyuluh swadaya direncanakan 100 orang terealisasi hanya 92 orang. Hal ini disebabkan oleh persyaratan administrasi untuk menjadi penyuluh ber sertifikat yang belum terpenuhi. Untuk penyuluh swadaya, kendala yang dihadapi adalah rendahnya minat pemuda tani untuk menjadi petani dan menjadi penyuluh swadaya. Kaderisasi merupakan persoalan yang dihadapi Gapoktan di Kabupaten Tegal.

Indikator jumlah produksi daging (kg) masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu 2.700.407 kg dibanding target sebesar 5.788.587 kg. Begitu juga indikator jumlah produksi susu (liter) dan produksi telur (kg) masih di bawah target, masing-masing 137.586 liter dan 3.125.014 liter sementara target yang ditetapkan sebesar 715.950 liter dan 4.934.109 liter.

Pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ditetapkan indikator konsumsi daging (kg), konsumsi telur (kg) dan konsumsi susu (kg/kapita/tahun). Semua indikator menunjukkan capaian kinerja lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan. Konsumsi daging pada tahun 2015 sebanyak 2.232.000 kg masih di bawah target sebanyak 4.821.000 kg. Begitu juga konsumsi telur yang ditargetkan sebanyak 4.056.000 terealisasi sebanyak 2.231.000. Untuk konsumsi susu terealisasi 0,098 kg/kapita/tahun, masih di bawah target 0,381 kg/kapita/tahun.

## URUSAN KEHUTANAN

Urusan Kehutanan terdiri dari 4 program dan 5 indikator kinerja. Urusan Kehutanan diampu oleh Distanbunhut. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kehutanan.

**Tabel 3.31**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Kehutanan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>				
	1. Jumlah unit pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK	4 Unit	2 Unit	5 unit	Distanbunhut
	2. Kegiatan Optimalisasi PSDH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	Distanbunhut
2.	<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>				
	1. Persentase lahan kritis direhabilitasi	8,6	8,2	7,58	Distanbunhut
3.	<b>Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</b>				
	1. Jumlah pengawasan industri hasil hutan	20 Unit	20 Unit	20 unit	Distanbunhut
4.	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>				
	1. Pendampingan kelompok usaha hutan rakyat terlaksana pertahun	14 Unit	14 unit	14 unit	Distanbunhut

Sumber: Distanbunhut, 2015.

Indikator-indikator pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan telah terealisasi sesuai target kinerja. Indikator jumlah unit pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SLVK terealisasi di atas target, yaitu 5 unit dibanding target hanya 3 unit. Namun untuk indikator persentase lahan kritis direhabilitasi pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan hanya terealisasi 7,58% dari target 8,2%. Program ini didukung oleh ketersediaan bibit tanaman dari DAK Kehutanan, Kebun Bibit Rakyat (APBN) dan Pengembangan Perhutanan Sosial (APBN). Kegiatan DAK Kehutanan dan kegiatan kehutanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 karena permasalahan kelompok penerima kegiatan yang belum berbadan hukum sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator-indikator pada Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan dan Program Perencanaan Pengembangan Hutan telah terealisasi sesuai rencana. Indikator jumlah pengawasan industri hasil hutan terealisasi 20 unit dari target kinerja 20 unit. Sementara indikator pendampingan kelompok usaha hutan rakyat terlaksana per tahun sebanyak 14 unit juga sudah sesuai dengan target sebanyak 14 unit/tahun.

## URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diampu oleh Disperindag dan DPU, terdiri dari 3 program dan 3 indikator kinerja. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015.

**Tabel 3.32**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>				
1.	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	80,93	80,77	0	Disperindag
2.	<b>Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan</b>				
1.	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	80,93	80,77	0	Disperindag,
3.	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>				
1.	Rasio elektrifikasi	90,94	88,85	N/A	DPU

Sumber: Disperindag, 2015.

Dengan ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan penyelenggaraan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi untuk menertibkan usaha pertambangan dan pengawasan/pengendalian usaha pertambangan. Dengan demikian, meskipun Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan telah dianggarkan dalam APBD tahun 2015 namun tidak dilaksanakan karena bukan kewenangan pemerintah kabupaten.

## URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata diampu oleh Disparbud. Terdapat 3 program dengan 6 indikator kinerja Urusan Pariwisata. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2015.

**Tabel 3.33**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Pariwisata**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>				
1.	Jumlah kunjungan Wisman	289	197	308	Disparbud
2.	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				
1.	Jumlah promosi pariwisata	4	1	2	Disparbud
2.	Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara	426.081	418.081	591.366	Disparbud
3.	Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)	1	1	2	Disparbud
3.	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>				
1.	Jumlah kampung wisata	4	4	0	Disparbud
2.	Jumlah promosi wisata melalui media massa	3	1	4	Disparbud

Sumber: Disparbud, 2015.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah memenuhi target, yaitu 308 orang dibanding target sebanyak 197 orang. Hal ini mengindikasikan bila pariwisata di Kabupaten Tegal cukup dikenal wisatawan mancanegara. Selain itu capaian yang menggembirakan adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari target sebanyak 418.081 orang, terealisasi 591.366 orang. Hal ini juga menunjukkan sektor pariwisata masih berpotensi untuk dikembangkan. Meskipun hampir semua target telah terealisasi, namun indikator jumlah kampung wisata sebanyak 4 buah belum dapat direalisasikan pada tahun 2015. Membangun kampung wisata yang benar-benar eksis memang membutuhkan komitmen dan perhatian semua pihak, terutama pelaku pariwisata di Kabupaten Tegal dan pelaku pariwisata di tingkat nasional dan internasional.

## URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebanyak 14 dengan 8 program. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh DKPP. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 3.34**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Kelautan dan Perikanan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>				
	1. Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	7.483.746	5.585.870	DKPP
	2. Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.364.155	6.947.106	DKPP
2.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan</b>				
	1. Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk	10	2	0	DKPP
	2. Jumlah kegiatan masyarakat pengawasan sumber daya kelautan terlaksana	10	2	N/A	DKPP
3.	<b>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut</b>				
	1. Jumlah pemberdayaan masyarakat	2	2	0	DKPP
4.	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>				
	1. Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162.510	156.510	427.094	DKPP
5.	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>				
	1. Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.006.905	1.003.905	625.025	DKPP
6.	<b>Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan</b>				
	1. Persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi	93	82	89	DKPP
	2. Jumlah penyuluhan perikanan	18	8	N/A	DKPP
7.	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>				
	1. Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.006.905	1.003.905	557.500	DKPP
	2. Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	7.483.746	5.585.870	DKPP
	3. Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162.510	156.510	427.094	DKPP
	4. Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.364.155	6.947.106	DKPP
8.	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>				
	1. Penanaman mangrove (Ha)	121	113	0	DKPP

Sumber: DKPP, 2015.

Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp) masih di bawah target, yaitu 5.585.870 dibanding target sebesar 7.483.746. Meskipun demikian nilai produksi perikanan darat (ribu Rp) tercapai jauh di atas target, yaitu 6.947.106 dibanding target 1.364.155. Sementara

indikator jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk pada tahun 2015 tidak dilakukan pembentukan baru sehingga jumlah kelompok yang ada masih tetap seperti kondisi tahun lalu sebanyak 9 kelompok.

Pada Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, indikator kinerja persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi sebanyak 89%. Saat ini jumlah penyuluh PNS sebanyak 6 orang, dibantu Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 13 orang. Untuk indikator nilai produksi perikanan laut (kg) masih belum tercapai. Dari target 1.003.905 kg baru tercapai 557.500. Sementara untuk nilai produksi perikanan darat (kg) telah tercapai di atas target yaitu 427.094 dibanding target 156.510.

Dari indikator yang ada, terdapat 2 indikator yang capaian kinerjanya 0, karena kegiatan dalam program tidak dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dan penanaman mangrove sehingga realisasi kinerja kedua indikator tersebut adalah 0.

## URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan terdiri dari 16 indikator kinerja dan 4 program. Urusan perdagangan diampu oleh Disperindag dan Dinkop, UKM, Pasar. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perdagangan padat tahun 2015.

**Tabel 3.35**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Perdagangan**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>				
	1. Jumlah lembaga perlindungan konsumen	5	4	4	Disperindag
	2. Persentase pengaduan konsumen ditangani	90	50	50	Disperindag
	3. Persentase alat ukur yang ditera	85	65	70	Disperindag
2.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>				
	1. Nilai ekspor non migas (Rp)	121.280.610	113.280.610	N/A	Disperindag
	2. Volume ekspor non migas (ton)	21.000	16.000	N/A	Disperindag
	3. Ekspor bersih perdagangan (Rp)	101.000.000	95.000.000	N/A	Disperindag
3.	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>				

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	Jumlah pasar lelang daerah	1	1	N/A	Disperindag
2.	Jumlah sistem informasi perdagangan	1	1	N/A	Disperindag
3.	Jumlah pasar tradisional yang representatif	10 Pasar	2 Pasar	2 pasar	Dinas Kop UKM & Pasar
4.	Jumlah retribusi pasar	26 Pasar	26 Pasar	26 pasar	Dinas Kop UKM & Pasar
5.	Jumlah alat kebersihan pasar	5 unit	5 Unit	0	Dinas Kop UKM & Pasar
4.	<b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>				
1.	Jumlah kelompok pedagang kaki lima	55	35	36	Disperindag
2.	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dibina	14	6	7	Disperindag
3.	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	6.560	5.760	5810	Disperindag
4.	Jumlah kawasan PKL dan asongan	30	10	11	Disperindag
5.	Jumlah kawasan PKL dan asongan yang dibina	20	7	8	Disperindag

Sumber: Disperindag; Dinkop, UKM, Pasar, 2015.

Pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan capaian kinerja telah sesuai target. Jumlah lembaga perlindungan konsumen terdapat 4 lembaga, dari target sebanyak 4 lembaga. Lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Tegal adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), YAPEKNAS (Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional), LAPPEK (Lembaga Perlindungan Konsumen) dan LSM Merah Putih. Untuk indikator persentase alat ukur yang ditera sebanyak 70%, tercapai di atas target sebesar 65%. Capaian kinerja yang menggembirakan ini dapat terwujud karena pemerintah semakin fokus menangani masalah perlindungan konsumen antara lain melalui pembentukan BPSK di Kabupaten Tegal. Disperindag juga aktif melakukan sosialisasi UU perlindungan konsumen di masyarakat maupun pelaku usaha serta mengenalkan BPSK kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena konsumen yang ada di masyarakat kita belum sepenuhnya cerdas sehingga mereka belum mengerti hak-hak mereka sebagai konsumen begitupun para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tegal kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.

Hal-hal yang masih perlu dilakukan diantaranya lebih mengintensifkan lagi sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen dan lebih mengenalkan BPSK di Kabupaten Tegal; lebih mengintensifkan pelaksanaan tera yang ada di wilayah Kabupaten Tegal selain menera



pemilik UTTP di pasar, peneraan juga dilakukan pada alat ukur/kilometer pelanggan PDAM. Usaha lain yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pasar tertib ukur tingkat nasional yang diajukan adalah pasar Trayeman dan memperoleh penghargaan tingkat nasional. Hal ini karena kesadaran pemilik UTTP untuk menera alat UTTPnya masih rendah. Selain itu Kabupaten Tegal belum mempunyai UPTD metereologi. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan di masa yang akan datang adalah mengajukan pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Tegal menjadi pasar tertib ukur. Selain itu ke depan perlu diinisiasi wilayah Kabupaten Tegal menjadi daerah tertib ukur dan membentuk UPTD Meteorologi

Untuk program peningkatan dan pengembangan ekspor rekapitulasi nilai ekspor keseluruhan dari masing-masing perusahaan baru bisa dihitung setelah akhir tahun atau pada awal tahun 2016, sehingga data belum tersedia pada tahun 2015. Sementara program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dilakukan kegiatan pembinaan PKL dan asongan telah dilaksanakan adapun yang dibina adalah PKL dan asongan yang berada di Jalan Letjen Suprpto. Capaian kinerja program ini terhitung menggembirakan. Dari target 6 kelompok PKL yang dibina, pada tahun 2015 telah 7 kelompok PKL yang dapat dibina, atau melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, sampai saat ini Kabupaten Tegal belum memiliki SK Bupati tentang pembentukan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Asongan di Kabupaten Tegal. Dengan adanya SK Bupati diharapkan penanganan PKL dan asongan di Kabupaten Tegal dapat diselenggarakan lebih baik lagi.

Untuk indikator jumlah pasar tradisional yang representatif, pada tahun 2015 teralisasi 2 pembangunan pasar dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pasar yang dibangun adalah Pasar Pagongan dan Pasar Kemantran. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kedua pasar tersebut adalah anggaran yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 100% penyelesaian dan penyempurnaan pembangunan pasar. Untuk itu pada tahun 2016 direncanakan pengalokasian anggaran untuk penyempurnaan kedua pasar tersebut sehingga layak dan nyaman dioperasikan. Untuk indikator kinerja alat kebersihan pasar sebanyak 5 unit tidak terealisasi karena anggaran alat kebersihan pasar dialokasikan untuk pembelian 6 sepeda motor Kepala UPTD Pasar.

## **URUSAN PERINDUSTRIAN**

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Disperindag dengan 4 program dan 5 indikator kinerja. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perindustrian pada tahun 2015.

**Tabel 3.36**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2015**  
**Urusan Perindustrian**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>				
	1. Jumlah pembinaan IKM	45	25	74	Disperindag
2.	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>				
	1. Jumlah ijin usaha IKM baru	35	15	N/A	Disperindag
	2. Jumlah kerjasama IKM	16	8	8	Disperindag
3.	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>				
	1. Jumlah produk SNI	12	3	1	Disperindag
4.	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>				
	1. Jumlah Klaster Industri Aktif	17	7	7	Disperindag

Sumber: Disperindag, 2015.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi pada tahun 2015 tidak dilaksanakan oleh Disperindag. Meskipun demikian, kegiatan pembinaan IKM dilakukan melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Dari target 25 IKM, jumlah IKM yang dibina pada tahun 2015 telah melebihi target, yaitu 74 IKM.

Untuk Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk pembinaan IKM. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan bantuan hibah baik berupa uang maupun barang disyaratkan kelompok harus memiliki badan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka Disperindag memotivasi IKM untuk membuat badan hukum secara mandiri.

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri masih belum optimal, tercapai 1 jumlah produk SNI dari target sebanyak 3 produk SNI. Hal ini terjadi karena prosedur persyaratan untuk memperoleh SNI sangat ketat. Sektor industri kecil kapasitasnya masih lemah dan sistem mutu belum berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk. Disperindag telah melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas produk baik melalui sosialisasi maupun lewat uji laboratorium. Sebagai rencana tindak lanjutnya adalah fasilitasi sertifikat SNI wajib bagi industri kecil dari pemerintah

Pada Program Penataan Struktur Industri permasalahan yang dihadapi secara umum klaster industri berjalan aktif namun tidak maksimal dan melemahnya nilai tukar rupiah sehingga berpengaruh terhadap harga bahan baku. Pembinaan dalam bentuk peningkatan akses pasar dan fasilitasi uji laboratorium serta pembinaan lainnya telah dilakukan sehingga target 7 klaster industri telah tercapai pada tahun 2015. Klaster industri yang ada di Kabupaten Tegal adalah klaster industri komponen kapal, *shutelcock*, komponen otomotif, batik, makanan ringan, tahu dan kerupuk mie.

## URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan transmigrasi terdiri dari 1 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Transmigrasi diampu oleh Dinsosnakertrans. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2015.

**Tabel 3.37**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPDTahun 2015**  
**Urusan Transmigrasi**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	SKPD
1.	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>				
	1. Jumlah kerjasama transmigrasi	1	1	1	Dinsosnakertrans
	2. Jumlah transmigran	67	47	6 KK/23 jiwa	Dinsosnakertrans

Sumber: Dinsosnakertrans, 2015.

Capaian kinerja Jumlah Kerjasama Transmigrasi Tahun 2015 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Berdasarkan kuota yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penempatan Transmigrans asal Kabupaten Tegal tahun 2015 adalah di UPT Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung.

Target Jumlah Transmigran sebanyak 47 jiwa dan hanya terealisasi 6 KK/23 jiwa yang diberangkatan ke lokasi tujuan pada minggu ke-2 bulan Desember (9 Desember 2015). Belum terpenuhinya target dikarenakan kuota transmigran ditentukan oleh pusat yang bergantung dengan ketersediaan anggaran dan juga kesiapan daerah tujuan yang terlalu jauh dari jangkauan yaitu di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM, anggaran kegiatan Rp. 132.000.000,-

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah dengan ditiadaknya bantuan sosial maka para transmigran tidak mendapatkan modal untuk membuka lahan di daerah tujuan. Sering terjadi transmigran pulang ke daerah asal dikarenakan Pemerintah Daerah tujuan tidak menepati poin-poin dalam KSAD. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah peningkatan anggaran untuk sharing pendanaan dalam pembangunan kawasan transmigrasi.



